



2025

RENCANA KERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Indonesia Bersih Narkoba

+62-21-8087-1567

callcenter@bnn.go.id

JL. M.T. Haryono No. 11
Cawang, Jakarta Timur 13630





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. DASAR HUKUM.....	7
BAB II ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN FOKUS PRIORITAS	9
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
B. FOKUS PRIORITAS RENCANA PROGRAM KERJA 2025.....	14
BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	17
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	vii
LAMPIRAN I DAFTAR PROYEK PRIORITAS NASIONAL BNN TAHUN 2025.....	viii
LAMPIRAN II RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN 2025.....	x
LAMPIRAN III ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN 2025	xv
LAMPIRAN IV DAFTAR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) KEGIATAN TAHUN 2025	xvii
LAMPIRAN V RINCIAN ALOKASI ANGGARAN UNIT KERJA PUSAT, BNNP, DAN BNNK TAHUN 2025	xxii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.....	2
Gambar 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BNN Tahun 2025	10
Gambar 2. 2 7 (tujuh) Lokus Provinsi Prioritas	13

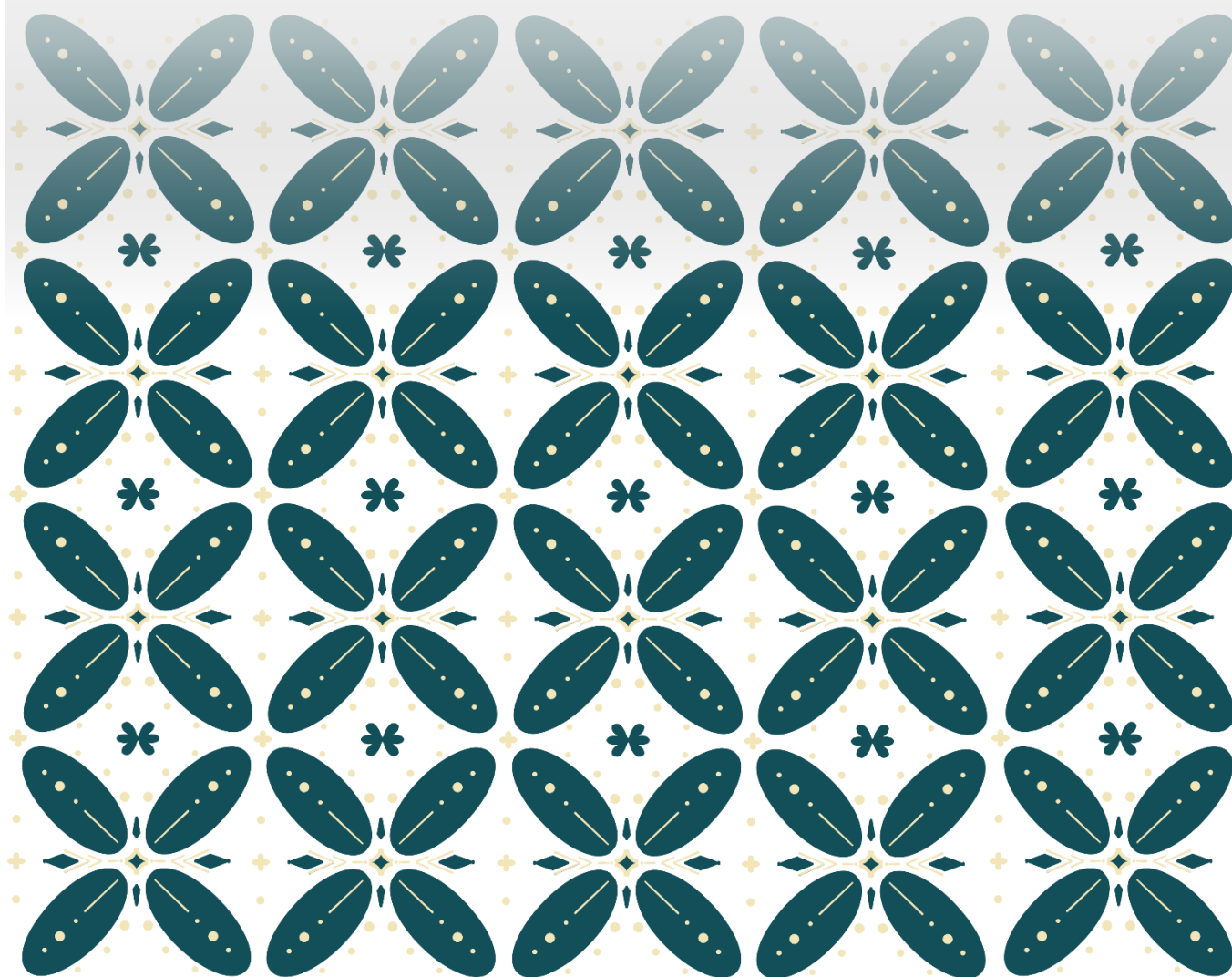
DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Anggaran BNN Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja.....	18
Tabel 3. 2 Proporsi Anggaran BNN Tahun 2025 berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	18
Tabel 3. 3 Alokasi Anggaran BNN berdasarkan Fungsi Unit Kerja	19





Kata Pengantar



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BNN Tahun 2025 disusun mengikuti kaidah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Proses penyusunan Renja BNN telah melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan Rancangan Awal Renja; penyusunan Rancangan Renja; dan pemutakhiran Renja. Ketiga tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian/keselarasan Renja dengan berbagai perkembangan kebijakan pemerintah yang terjadi selama periode perencanaan meliputi aspek struktur program dan kegiatan, aspek kinerja, serta aspek anggaran.



Rencana kinerja program dan anggaran yang menjadi substansi pokok dalam Renja BNN Tahun 2025 telah disepakati bersama oleh BNN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan pada pertemuan tiga pihak (*trilateral Meeting*). Dengan demikian, Renja BNN Tahun 2025 berkedudukan sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan rencana kerja dan anggaran seluruh unit kerja di lingkungan BNN.

Dokumen Renja BNN Tahun 2025 ini bersifat adaptif dan dinamis, mengikuti kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021. Oleh karenanya, dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atau pemutakhiran hingga akhir periode tahun pelaksanaan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah.

Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional

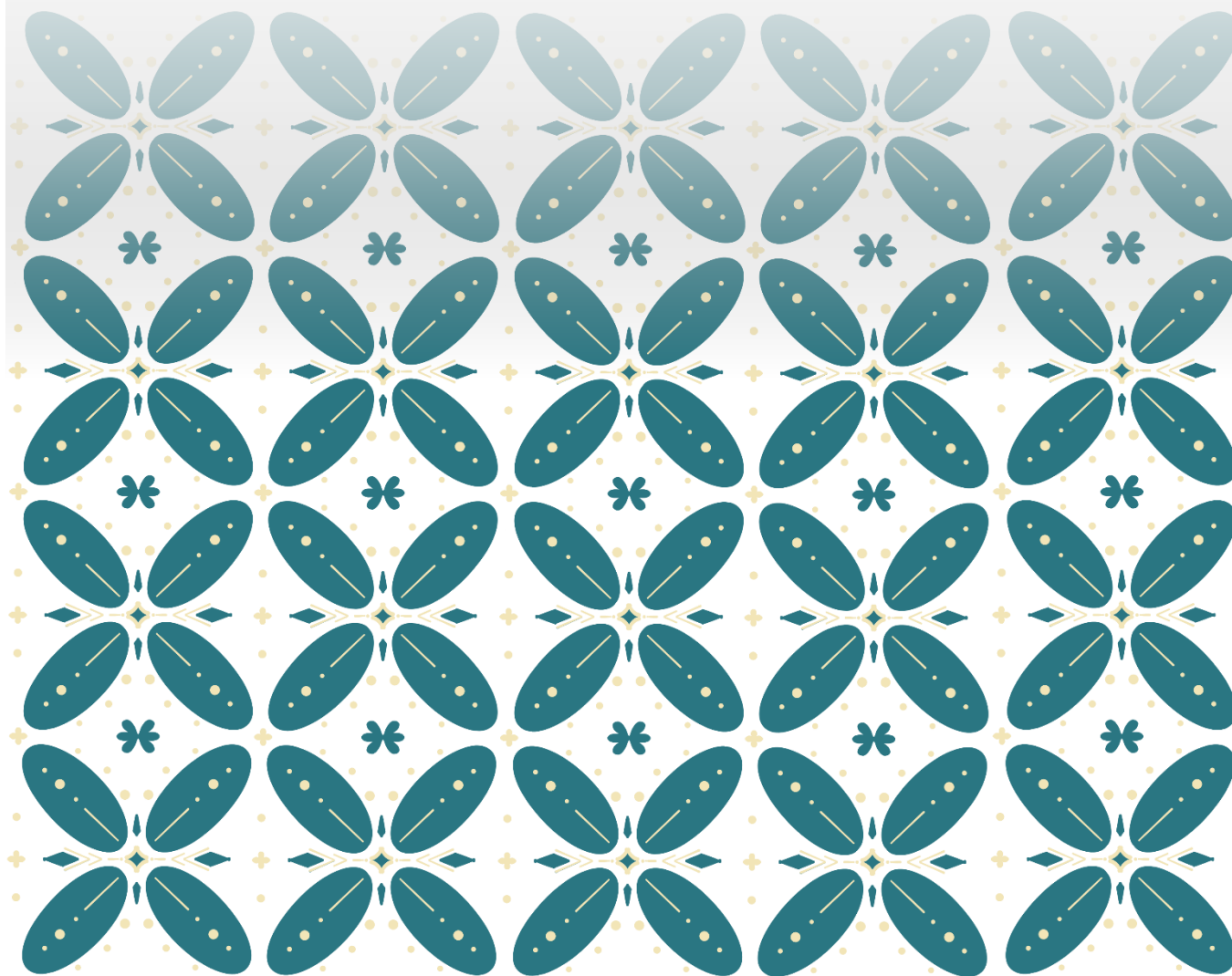
Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si.





Bab 1

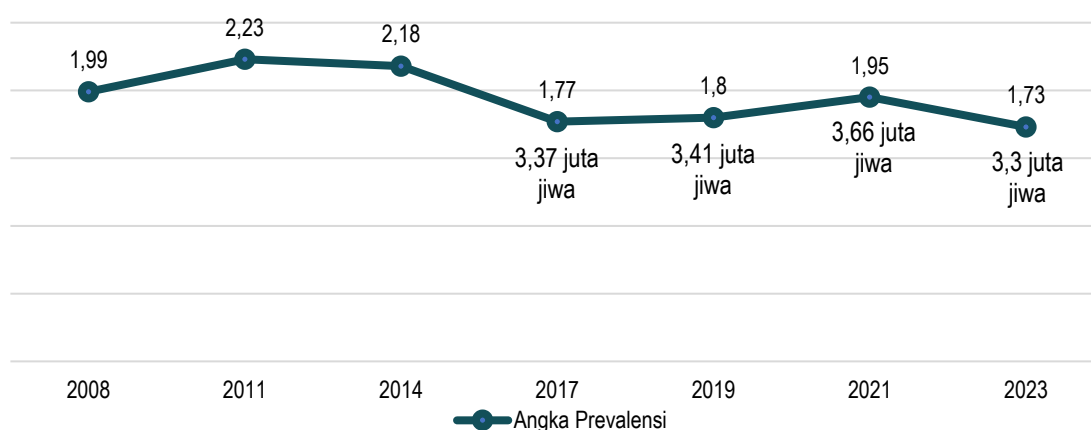
Pendahuluan



A. LATAR BELAKANG

Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Tahun 2025 menjadi titik akhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan sekaligus menjadi titik awal periode RPJPN 2025–2045. Tahun 2025 memuat fondasi awal yang menghubungkan transisi estafet pembangunan nasional dalam kesatuan upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, sebagai “*Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan*”, sebagaimana Visi RPJPN 2025–2045.

Tahun 2025 juga merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. RPJMN 2025–2029 dengan visi jangka menengah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, didukung oleh 8 (delapan) misi sebagai Prioritas Nasional (PN) serta 17 (tujuh belas) Program Prioritas (PP). Salah satu misi yang menjadi PN ke-7 bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta **memperkuat pencegahan dan pemberantasan** korupsi, **narkoba**, judi, dan penyelundupan*”. PN 7 tersebut disokong oleh PP “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”. Keberadaan BNN yang menjadi *leading sector* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Indonesia menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara dari kejahatan narkoba. Kinerja BNN selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi terkini penyalahgunaan narkoba.



Gambar 1. 1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Ket: Responden berada pada rentang usia 15-64 tahun

Sumber: Survei Prevalensi BNN, BPS dan BRIN Tahun 2023



Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15–64 tahun. Di Indonesia sendiri, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73% berdasarkan hasil Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023. Meskipun trennya turun jika dibandingkan hasil survey periode sebelumnya di tahun 2021 (1,95%), namun angka tersebut setara dengan 3,3 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Hasil survei juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15–24 tahun. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi isu serius yang perlu mendapat perhatian lebih.

1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Indeks P4GN menjadi ukuran keberhasilan lembaga dalam penyelenggaraan program P4GN. Indikator ini menggunakan basis data kinerja yang relevan dan akurat pada struktur, proses, capaian, serta dampak program di setiap level administrasi dalam pengukuran efektivitas program P4GN. Capaian Indeks P4GN di tahun 2024 sebesar **65,1**. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 (63,6), dan mengindikasikan bahwa kebijakan serta intervensi program pada bidang-bidang P4GN yang dijalankan oleh BNN telah cukup tepat dan membuahkan hasil positif.

Beberapa torehan capaian pelaksanaan program dan kegiatan P4GN Bidang Pencegahan BNN di tahun 2024 sebagai berikut: (1) Advokasi pembentukan 344 Desa Bersih Narkoba (Bersinar) kepada para aparatur pemerintahan desa; (2) Advokasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba kepada 1.040 orang anggota keluarga; (3) Pelatihan pengembangan *soft skill* untuk di 1.135 sekolah yang melibatkan 2.073 orang guru/tenaga pengajar; (4) Dialog interaktif remaja dan pembentukan 1.873 orang pelajar sebagai *peer educator*; (5) Diseminasi informasi dan edukasi P4GN melalui media elektronik dan non elektronik kepada 50.845.546 orang anggota masyarakat; dan (6) Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN kepada 9.908.291 orang peserta.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN memiliki capaian: (1) Fasilitasi implementasi program kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba di 173 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang menghasilkan skor IKoTAN sebesar 3,107 dengan kategori “Tanggap” dan pencapaian mutu “B”; (2) Pembentukan dan pengembangan kapasitas 11.537 orang penggiat P4GN; (3) Pemulihan kawasan rawan di 66 kawasan, terutama di wilayah perbatasan dan pesisir Indonesia, dengan 1.510 orang masyarakat yang dibina dan 452 orang di antaranya beralih profesi dari “pekerjaan” yang berkaitan dengan narkoba ke profesi yang lebih positif dan produktif; dan



(4) Pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang melalui budidaya komoditi alternatif pada lahan seluas 983,2 ha yang melibatkan 358 petani.

Bidang Rehabilitasi BNN menorehkan capaian: (1) Indeks Kapabilitas Rehabilitasi sebesar 3,51 dari target 3,4; (2) Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup berdasarkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan mencapai rata-rata 84,03% dari target 68%; (3) Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi sebesar 3,62 (pada fasilitas rawat jalan) dan 3,66 (pada fasilitas rawat inap) dari target 3,3; (4) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap 13.852 orang penyalahguna narkoba dari total 40.900 individu yang mengakses layanan pada seluruh fasilitas rehabilitasi narkoba di Indonesia; (5) Penyelenggaraan layanan pascarehabilitasi terhadap 4.942 orang klien yang telah menjalani layanan rehabilitasi; (6) Peningkatan kemampuan terhadap 225 orang petugas rehabilitasi narkoba; (7) Pemberian sertifikasi kompetensi kepada 106 orang petugas rehabilitasi narkoba; (8) Pembentukan 418 unit rehabilitasi dari kelompok masyarakat (Intervensi Berbasis Masyarakat); (9) Pembentukan dan pelatihan kepada 2.217 orang petugas agen pemulihan; dan (10) Peningkatan kemampuan berupa penguatan, dorongan, dan fasilitasi lembaga rehabilitasi selama periode 2020–2024 sehingga saat ini sebanyak 367 lembaga rehabilitasi telah memenuhi Standar Rehabilitasi Nasional.

Capaian kinerja Bidang Pemberantasan BNN tahun 2024 meliputi: (1) Pengungkapan 27 jaringan sindikat narkoba yang terdiri dari 13 jaringan sindikat narkoba nasional dan 14 jaringan sindikat internasional; (2) Pengungkapan 618 kasus tindak pidana narkoba dan 2 kasus *clandestine laboratory* narkoba dengan mengamankan 974 orang tersangka kasus tindak pidana narkoba serta 11 orang tersangka kasus *clandestine laboratory* narkoba; (3) Penetapan dan pengejaran terhadap 363 orang Daftar Pencarian orang (DPO) dan telah berhasil mengamankan 26 orang di antaranya; (4) Penyitaan terhadap barang bukti narkoba berupa 710.980,59 gram sabu 2.178.034,61 gram ganja; 1.077,69 gram ganja sintetis; 290.737,23 butir dan 138.404,29 gram ekstasi; 2.760 gram heroin; 4.335,34 gram kokain; 971.000 butir dan 2.800 gram PCC; serta 1.300 ml cairan prekursor narkoba; (5) Eradikasi 135.000 m² lahan ganja dengan berat tanaman ganja basah mencapai 35,5 ton di wilayah barat Indonesia; (6) Pengungkapan 13 kasus TPPU yang melibatkan 15 tersangka dengan barang bukti aset disita senilai total Rp 111.535.843.866,00; dan (7) Pengawasan terhadap perkembangan *new psychoactive substances* (NPS) yang telah teridentifikasi beredar di seluruh dunia (1.261 jenis NPS) dan 172 NPS di antaranya telah masuk ke Indonesia. Bersama Kementerian Kesehatan, sejumlah 167 NPS dari 172 Jenis NPS tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sehingga memiliki ketetapan hukum



(Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika).

2. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dan melatarbelakangi penyusunan program dan kegiatan BNN tahun 2025 sebagai berikut:

Isu pertama terkait Kolaborasi Pemangku Kepentingan. Isu ini sangat penting karena persoalan narkoba merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensi, melibatkan berbagai aspek seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Tidak ada satu pihak pun dapat mengatasi masalah narkoba secara sendiri. BNN telah melakukan berbagai upaya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya penanganan masalah narkoba, bahkan dukungan telah muncul dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya semisal kesulitan dalam pengkoordinasian tindakan, bias dalam menyepakati pembagian tugas dan sumber daya, serta potensi yang tidak berfungsi optimal dari berbagai aktor kolaborasi. Kendala tersebut disebabkan oleh ketidakpahaman penguatan fungsi dari beberapa aktor kolaborasi (terkhusus pemerintah daerah) dalam menangani masalah narkoba dan diperkuat oleh *silo mentality* yang terkemas kuat dalam budaya organisasi para aktor kolaborasi.

Meskipun demikian, kolaborasi dari para pemangku kepentingan merupakan sebuah keniscayaan. Sumber daya yang terbatas dan terserak (*scattered*) di setiap pemangku kepentingan, peran dan keahlian berbeda dari setiap pemangku kepentingan, serta lingkup masalah narkoba yang luas dan amat dinamis menjadi beberapa alasan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan narkoba tetap harus dilakukan. Di tahun 2025, selain Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN yang dirumuskan kembali sebagai instrumen kebijakan kolaboratif penanganan permasalahan narkoba, P4GN juga didudukkan sebagai program prioritas pembangunan penanganan permasalahan narkoba lintas K/L dan lintas sektor dalam RPJMN 2025–2029.

Isu kedua berkenaan dengan Perkembangan Jaringan dan Modus Peredaran Gelap yang Semakin Kompleks. Jaringan sindikat kejahatan narkoba merupakan organisasi kriminal yang terstruktur dan terorganisir serta didukung oleh sumber daya finansial yang kuat. Sindikat kejahatan narkoba melibatkan jaringan yang sangat luas dalam peredaran narkoba ilegal berskala besar. Mulai dari pemodal, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, hingga penjual/pengedar dan kurir di tingkat lokal. Jaringan sindikat tersebut terus bermutasi dan berkembang secara canggih, sulit terdeteksi, dan tidak beroperasi secara sederhana. Mereka selalu beradaptasi dan



mengembangkan strategi baru untuk menghindari penangkapan dan memaksimalkan keuntungan.

Modus operandi yang beragam di antaranya: (1) Penggunaan platform *e-commerce* untuk pemesanan narkoba secara online yang disamarkan seolah-olah merupakan barang legal; (2) Penggunaan mata uang digital (*criptocurrency*) yang sulit dilacak dalam transaksi narkoba; (3) Penggunaan jaringan gelap (*darknet*) sebagai tempat bertransaksi yang aman dan sulit diakses oleh aparat penegak hukum; (4) Pemanfaatan jaringan (media) sosial dalam perekrutan kurir atau pengguna baru secara online dan untuk melakukan propaganda; (5) Pemanfaatan kurir ekspres atau pos untuk pengiriman narkoba ilegal berskala kecil maupun besar; serta (6) Penggunaan teknik kamuflase pada berbagai jenis barang dan kendaraan untuk menyembunyikan narkoba ilegal yang akan diedarkan. Sebagai contoh, Di tahun 2024 BNN berhasil mengamankan lebih dari seratus kilogram narkotika jenis sabu yang diselundupkan dengan menggunakan Kapal LCT (*Landing Craft Tank*) berbobot 500 ton dan panjang 45 meter di perairan Batam.

Isu ketiga terkait dengan Maraknya Aktivitas Penyelundupan dari Luar Negeri. Kondisi geografis Indonesia yang kompleks sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang dan juga wilayah perbatasan darat yang luas, menyulitkan bagi upaya pengawasan aktivitas kejahatan transnasional penyelundupan narkoba. Sepanjang tahun 2024, BNN dan Bea Cukai telah menggagalkan beberapa kali upaya penyelundupan narkoba jenis sabu melalui jalur laut dengan titik sentral pada wilayah Indonesia bagian barat. Penggagalan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi juga berulang kali dilakukan pada pintu-pintu masuk perbatasan darat wilayah Indonesia di Kalimantan Barat berkat kerja sama antara BNN, Bea Cukai, dan Satuan Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas).

Maraknya upaya penyelundupan narkoba memasuki wilayah Indonesia, selain disebabkan oleh masih lemahnya sistem pengawasan di jalur masuk yang beragam, juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan dan pelibatan partisipasi aktif masyarakat di wilayah jalur-jalur masuk (pesisir dan perbatasan) dalam melakukan pencegahan penyelundupan narkoba.

Isu keempat berhubungan dengan Keterbatasan Sumber Daya BNN. Jika dibandingkan dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, kondisi keterbatasan sumber daya BNN selalu menjadi isu yang berulang di setiap tahunnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas, dukungan anggaran yang belum ideal dan belum proporsional dalam alokasi program dan kegiatan, sarana dan prasarana yang belum memadai (sebagian aset berstatus pinjam/sewa), serta struktur kelembagaan unit vertikal yang belum



memperhatikan karakteristik kerawanan daerah, akan sangat mempengaruhi efektivitas dan hasil intervensi program yang dilakukan. Menjadi penting untuk mengadaptasi struktur kelembagaan, SDM, dan juga anggaran secara asimetrik pada unit-unit kerja vertikal sesuai “ukuran” dan kompleksitas masing-masing wilayah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2025–2029;
10. Surat Edaran Bersama antara Kemenkeu dan Bappenas Nomor S-122/MK.02/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

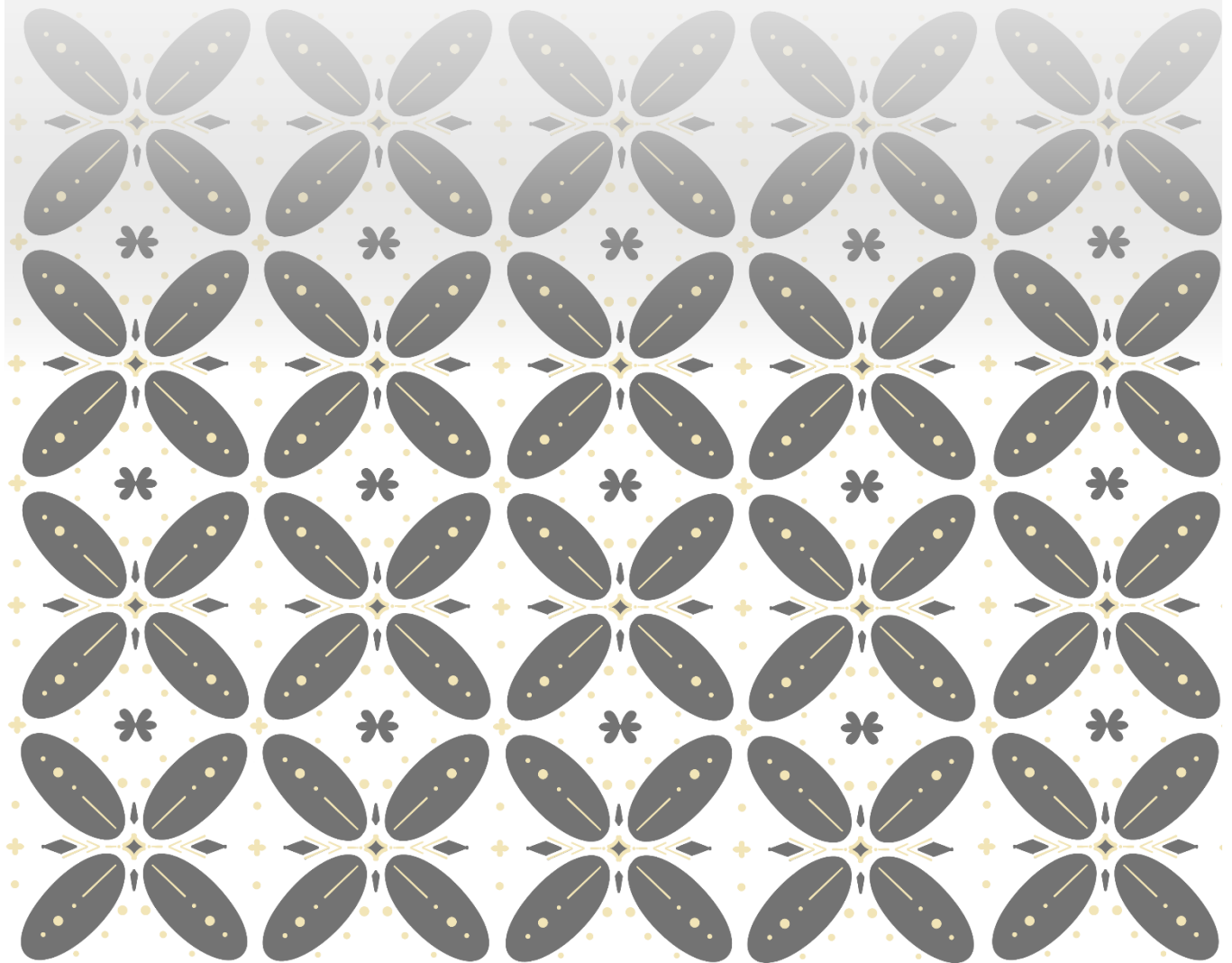






Bab 2

Arah Kebijakan, Strategi, dan Fokus Prioritas

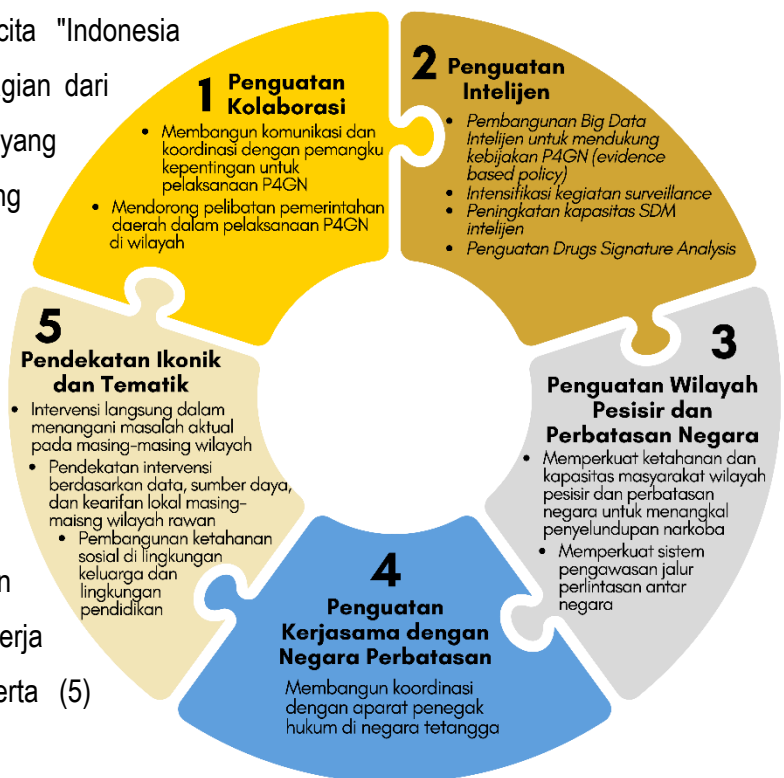


A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengusung tema besar **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Tema ini dirancang dengan mempertimbangkan sejumlah elemen penting, seperti arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, isu-isu strategis, serta masukan dari berbagai pihak melalui forum konsultasi publik. Semua aspek ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mempersiapkan masa transisi menuju tahap awal pelaksanaan agenda besar pembangunan nasional. RKP tahun 2025 yang menjadi pedoman utama bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk BNN, dalam menyusun rencana kerjanya, menjadi pijakan penting dalam perjalanan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Terkait arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba, RKP tahun 2025 menetapkan sasaran pembangunan yaitu **“Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba”** dengan target indikator **Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,7%.** Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut, BNN merumuskan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang berorientasi pada cita-cita "Indonesia

Bersinar" (Bersih Narkoba) sebagai bagian dari upaya kontribusi mewujudkan bangsa yang sehat dan produktif. Kondisi bangsa yang sehat dan produktif merupakan investasi yang sangat penting dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Adapun Arah kebijakan dan strategi BNN tersebut yaitu: (1) penguatan kolaborasi (2) penguatan intelijen P4GN (3) penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara (4) penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, serta (5) pendekatan tematik dan ikonik.



Gambar 2. 1 Arah Kebijakan dan Strategi BNN Tahun 2025

Penguatan Kolaborasi. Arah kebijakan

dan strategi penguatan kolaborasi ditetapkan untuk menjawab isu permasalahan narkoba yang sangat kompleks, serta untuk mengatasi keterbatasan sumber daya BNN dan pemangku kepentingan



lainnya yang juga terserak/tersebar. Operasionalisasi penguatan kolaborasi dilakukan melalui perumusan konstruksi proses bisnis berbasis *shared outcome* dan *shared flexible resources* lintas pemangku kepentingan (model kolaborasi aktor), membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan para pemangku kepentingan sebagai aktor kolaborasi (terkhusus pemerintah daerah), serta memperluas peluang kolaborasi dengan patron sosial di masyarakat.

Penguatan Intelijen P4GN. Penguatan intelijen merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan P4GN. Arah kebijakan dan strategi ini diambil untuk merespon isu perkembangan jaringan dan modus peredaran gelap yang semakin kompleks. Melalui penguatan intelijen P4GN, diharapkan tersedia informasi terkait parameter, dampak, dan ancaman aktivitas kejahatan narkoba yang berguna bagi pengambilan keputusan strategis dan operasional dalam pelaksanaan intervensi program P4GN.

Penguatan intelijen P4GN mencakup berbagai upaya pengumpulan, pengolahan, serta analisis data yang akurat dan relevan guna mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan narkoba secara lebih efektif. Langkah penguatan intelijen dilakukan melalui pembangunan *big data intelligence* yang mendukung kebijakan P4GN, intensifikasi kegiatan *surveillance*, peningkatan kapasitas SDM intelijen, dan penguatan *drugs signature analysis*.

Penguatan Wilayah Pesisir dan Perbatasan Negara. Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara merupakan pilihan arah kebijakan dan strategi dalam upaya menangkal isu maraknya aktivitas penyelundupan dari luar negeri. Operasionalisasinya dilakukan dengan memperkuat dan mengoptimalkan ketahanan masyarakat di wilayah-wilayah pesisir dan perbatasan negara untuk berperan aktif menangkal penyelundupan narkoba. Pelibatan masyarakat lokal sangat dibutuhkan karena masyarakat lokal memiliki aksesibilitas yang tinggi dengan lokasi kejadian. Keberadaan masyarakat lokal di garis depan dalam memantau aktivitas sekitar, dan dengan bekal pengetahuan yang mendalam terkait kondisi geografis dan karakteristik wilayahnya, menjadikan masyarakat lokal lebih sensitif terhadap adanya perubahan aktivitas seperti wajah-wajah asing, kapal-kapal mencurigakan, ataupun peningkatan lalu lintas di jalur-jalur tertentu. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai mata dan telinga bagi aparat penegak hukum dalam memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan berindikasi penyelundupan narkoba. Selain itu masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang diselenggarakan oleh BNN dan para pemangku kepentingan lainnya.



Penguatan sistem pengawasan jalur perlintasan antar negara juga dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas instansi dalam hal pelaksanaan operasi gabungan, peningkatan sarana prasarana dan kapasitas SDM perbatasan, serta pemanfaatan teknologi.

Penguatan Kerja Sama Dengan Negara Perbatasan. Penguatan kerja sama dengan negara perbatasan juga menjadi arah kebijakan dan strategi dalam mengatasi isu maraknya aktivitas penyelundupan dari luar negeri. Diharapkan dengan pelaksanaan strategi ini akan tercipta jaringan pertahanan yang lebih solid untuk memutus jalur distribusi narkoba jaringan sindikat kejahatan transnasional sehingga berdampak signifikan terhadap penurunan angka peredaran narkoba di wilayah Indonesia dan negara tetangga.

Penguatan kerja sama dilakukan dengan membangun koordinasi yang lebih intensif guna meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum antar negara dalam hal penguatan sistem perbatasan, pertukaran informasi intelijen, pertukaran pengalaman dan *best practice* penyelidikan dan penuntutan kasus narkoba, serta pelaksanaan patroli bersama maupun operasi gabungan dalam penangkapan sindikat narkoba yang beroperasi di wilayah perbatasan.

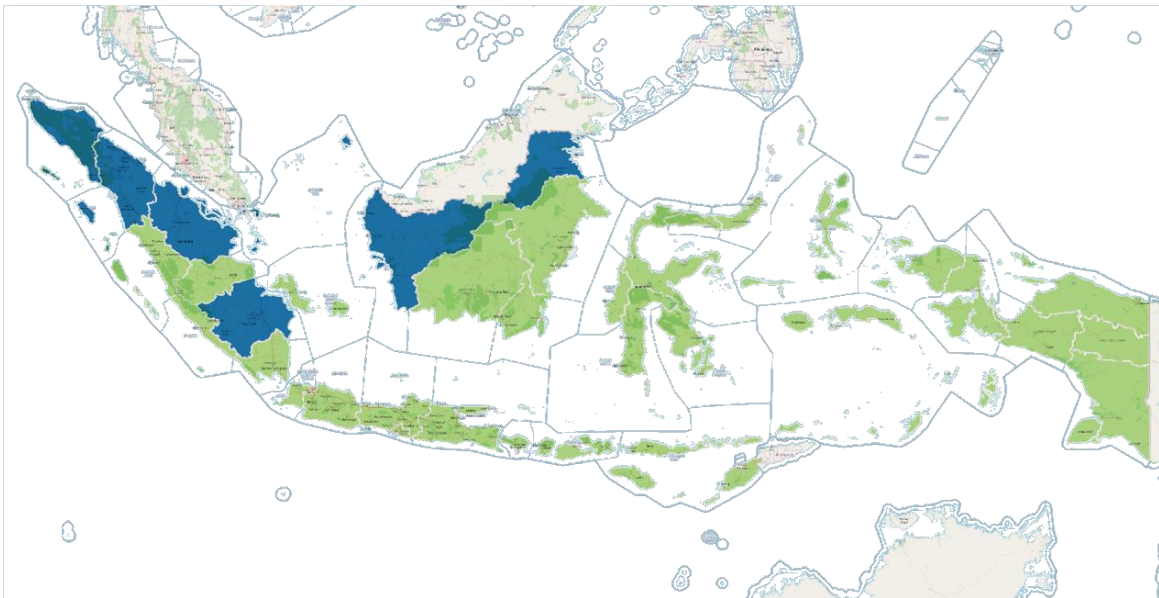
Pendekatan Tematik dan Ikonik. Pendekatan tematik dan ikonik dirumuskan untuk menjawab isu permasalahan narkoba yang kompleks dan kondisi keterbatasan sumber daya BNN. Arah kebijakan strategi tematik dan ikonik dilakukan melalui intervensi langsung di lapangan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan permasalahan narkoba yang aktual di masing masing wilayah. Melalui pendekatan tematik, BNN dapat menargetkan permasalahan yang spesifik, seperti penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, pekerja, atau masyarakat di daerah rawan. Sedangkan pendekatan ikonik mengarahkan perhatian pada wilayah atau isu-isu yang menjadi simbol atau representasi dari masalah narkoba yang lebih besar, seperti daerah perbatasan atau kota-kota besar yang menjadi pusat peredaran. Dengan demikian dapat dilakukan optimalisasi pendistribusian sumber daya secara tepat, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan intervensi program dan kegiatan.

Arah kebijakan tematik dan ikonik juga bertujuan untuk memaksimalkan dampak dari setiap program dengan merespon permasalahan yang ada di masyarakat dengan cepat dan tepat. Intervensi langsung ini mencakup berbagai aktivitas seperti kampanye pencegahan, rehabilitasi berbasis komunitas, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam memerangi narkoba. Dengan demikian, upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga terarah pada masalah spesifik yang memerlukan solusi terfokus.



Selain 5 (lima) arah kebijakan dan strategi di atas, BNN menetapkan 7 (tujuh) lokus provinsi prioritas sebagai fokus utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penentuan wilayah prioritas ini didasarkan pada tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang membutuhkan penanganan intensif dan terkoordinasi.

Melalui pendekatan berbasis prioritas, BNN dapat memaksimalkan alokasi sumber daya manusia, anggaran, serta program kerja secara lebih efektif di wilayah-wilayah tersebut sehingga diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba dalam upaya mendukung pencapaian target "Indonesia Bersinar" secara bertahap. Ketujuh provinsi prioritas dimaksud yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 2. 2 7 (tujuh) Lokus Provinsi Prioritas



B. FOKUS PRIORITAS RENCANA PROGRAM KERJA 2025

BNN menyusun skala prioritas pengalokasian anggaran dalam 6 (enam) tingkatan berdasarkan tingkat urgensi atau kebutuhan. Enam skala prioritas tersebut adalah:

1. Prioritas Operasional Rutin

Merupakan alokasi anggaran untuk kebutuhan sehari-hari lembaga yang menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Belanja Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

Merupakan alokasi anggaran untuk belanja non operasional yang berkarakteristik operasional sehingga wajib dipenuhi pengalokasiannya. Pengalokasian anggaran yang tidak memadai untuk komponen belanja ini akan berdampak pada pencapaian sasaran kinerja yang tidak optimal. Pemeliharaan peralatan yang dimiliki dan digunakan pada/oleh unit kerja bidang teknis merupakan alokasi terbesar dari komponen belanja ini.

3. Prioritas Layanan Publik

Merupakan alokasi anggaran untuk pelayanan publik kepada masyarakat, meliputi layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), layanan rekomendasi izin prekursor, layanan laboratorium, dan lainnya.

4. Proyek Prioritas Nasional

Merupakan alokasi anggaran untuk rincian output prioritas nasional (RO PN) sebagai keluaran kegiatan yang spesifik dan telah ditetapkan sebagai prioritas berdasarkan kesepakatan tiga kementerian/lembaga (BNN, Bappenas, Kemenkeu) untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Terdapat 15 (lima belas) RO PN BNN di Tahun 2025 yang terklaster dalam Proyek Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Proyek Prioritas Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika. Informasi terkait RO PN BNN Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada lampiran I.

5. Prioritas Lembaga

Merupakan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak organisasi yang mendukung arah kebijakan dan strategi BNN namun belum teralokasi dalam RO PN atau terkait tugas khusus dari Kepala BNN. Beberapa hal yang menjadi prioritas lembaga di tahun 2025 yaitu: (a) Penguatan Tugas dan Fungsi Intelijen P4GN berupa Intensifikasi Kegiatan *Surveillance*, Rekrutmen Pelaksana Intelijen, dan Pengembangan Kapasitas Pelaksana Intelijen; (2) Penguatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu Penyalah Guna Narkoba; (3) Pelaksanaan Forum Komunikasi



P4GN Dengan Para Pemangku Kepentingan; (4) Pelaksanaan Rehabilitasi Rawat Jalan Keliling; dan (5) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

6. Prioritas Unit Kerja

Merupakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja atau sebagai output regular unit kerja.

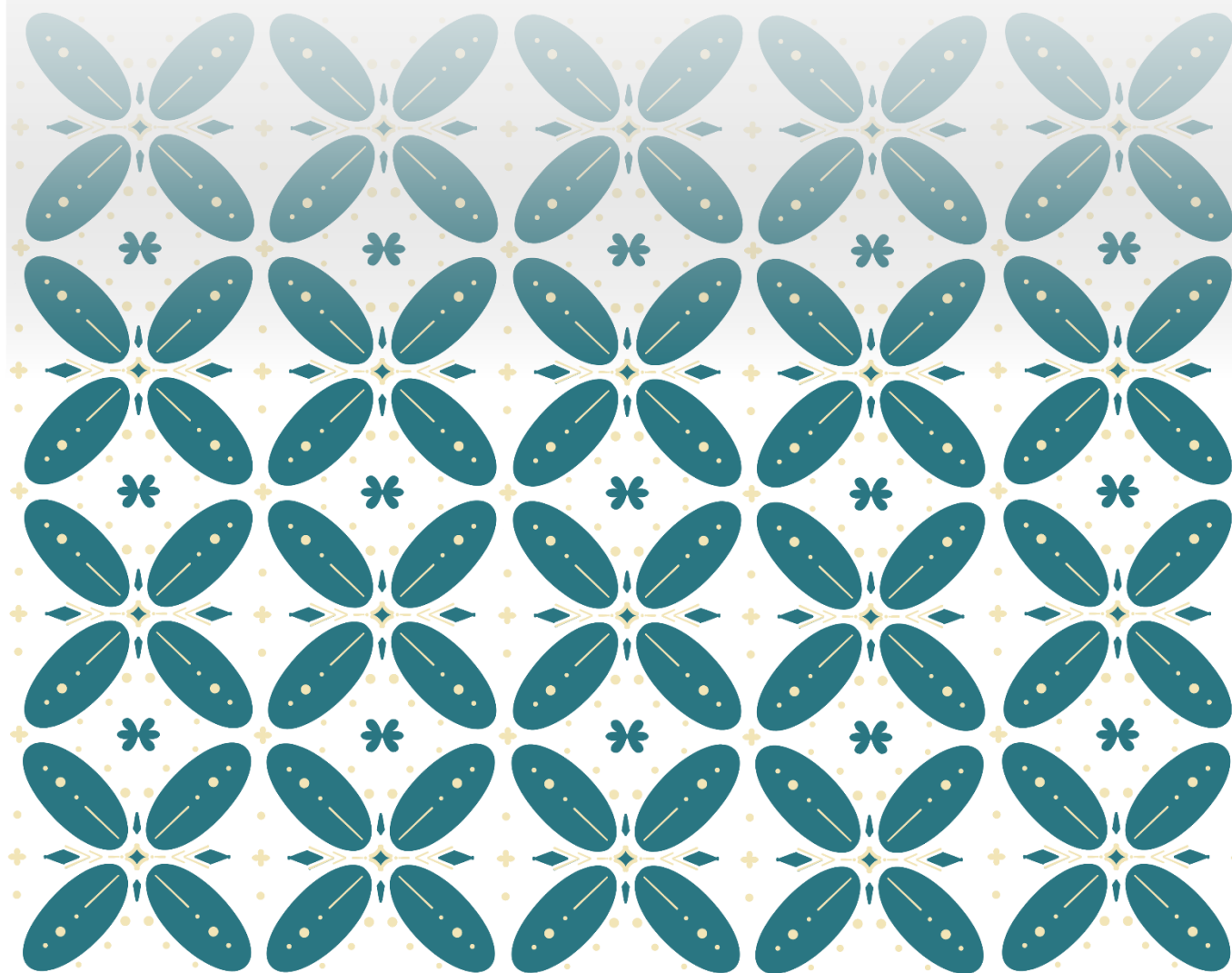






Bab 3

Rencana Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan



Alokasi anggaran BNN sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 yang menindaklanjuti hasil rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran TA 2025, ditetapkan sebesar **Rp2.455.081.387.000**. Anggaran tersebut terdistribusi untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) program di BNN yakni;

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebesar **Rp371.461.763.000 (15,13%)**;
2. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp2.083.619.624.000 (84,87%)**.

Berdasarkan kebutuhan jenis belanja, anggaran BNN dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Anggaran BNN Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Operasional	Non Operasional	Total	%
1	Belanja Pegawai	682.990.801.000		682.990.801.000	27,82%
2	Belanja Barang	430.231.438.000	581.306.332.000	1.011.537.770.000	41,20%
3	Belanja Modal		760.552.816.000	760.552.816.000	30,98%
Jumlah		1.113.222.239.000	1.341.859.148.000	2.455.081.387.000	100,0%
%		45,34%	54,66%	100,0%	

Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke seluruh unit kerja atau satuan kerja BNN baik pada tingkat pusat dan daerah untuk menyelenggarakan berbagai program kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi BNN yakni pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi penyalah guna narkoba, pemberantasan, hukum dan kerjasama, kesekretariatan, pengawasan internal, pengelolaan data dan informasi, Laboratorium Uji Narkoba, dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. Adapun proporsi bobot alokasi anggaran pada setiap fungsi di BNN sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Proporsi Anggaran BNN Tahun 2025 berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Fungsi	Anggaran	%
1	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	44.147.001.000	1,80%
2	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	45.645.929.000	1,86%
3	Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba	72.209.454.000	2,94%
4	Pemberantasan Kejahatan Narkoba	194.773.779.000	7,93%
5	Hukum dan Kerjasama	10.421.956.000	0,42%
6	Kesekretariatan Lembaga	2.022.771.954.000	82,39%
7	Pengawasan Internal	7.117.680.000	0,29%
8	Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi P4GN	40.069.342.000	1,63%
9	Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	4.263.644.000	0,17%
10	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BNN	13.660.648.000	0,56%
Jumlah		2.455.081.387.000	100%



Anggaran BNN Tahun 2025 dialokasikan untuk membiayai berbagai rencana kinerja program kegiatan. Adapun informasi alokasi anggaran dan rencana kinerja program kegiatan BNN Tahun 2025 secara lengkap sebagaimana dalam lampiran II dan III.

Dari keseluruhan anggaran BNN Tahun 2025, alokasi untuk RO PN sebanyak **Rp109.350.800.000** atau sekitar **4,45%** dari keseluruhan anggaran BNN. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 15 RO PN yang terdistribusi pada fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, serta dukungan. Terkait pelaksanaan manajemen kinerja dan penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, BNN akan mengadaptasi kebijakan tersebut dan terus memperbaikinya dalam struktur perencanaan dan penganggaran Tahun 2025. Rumusan RO di lingkungan BNN telah disesuaikan dengan karakteristik hasil akhir yang bersifat spesifik dari masing-masing pelaksanaan berbagai tahapan kegiatan. Informasi Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output BNN Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran IV.

Mengenai pengalokasian anggaran BNN berdasarkan fungsi pada seluruh unit kerja baik pusat dan unit kerja vertikal sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Alokasi Anggaran BNN berdasarkan Fungsi Unit Kerja

No	Fungsi	Anggaran		
		Unit Kerja Pusat	Unit Kerja Vertikal	Total
1	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	13.623.001.000	30.524.000.000	44.147.001.000
2	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	2.826.854.000	32.819.075.000	45.645.929.000
3	Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba	15.550.790.000	56.658.664.000	72.209.454.000
4	Pemberantasan Kejahatan Narkoba	133.653.416.000	61.120.363.000	194.773.779.000
5	Hukum dan Kerjasama	10.421.956.000	-	10.421.956.000
6	Kesekretariatan Lembaga	1.402.671.017.000	620.100.937.000	2.022.771.954.000
7	Pengawasan Internal	7.117.680.000	-	7.117.680.000
8	Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi P4GN	40.069.342.000	-	40.069.342.000
9	Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	4.263.644.000	-	4.263.644.000
10	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BNN	13.660.648.000	-	13.660.648.000
JUMLAH		1.653.858.348.000	801.223.039.000	2.455.081.387.000
%		67,36%	32,64%	100,00%

Secara lebih detil sebaran alokasi anggaran pada masing-masing unit kerja baik pusat dan unit kerja vertikal BNNP/BNNK pada Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada lampiran V.

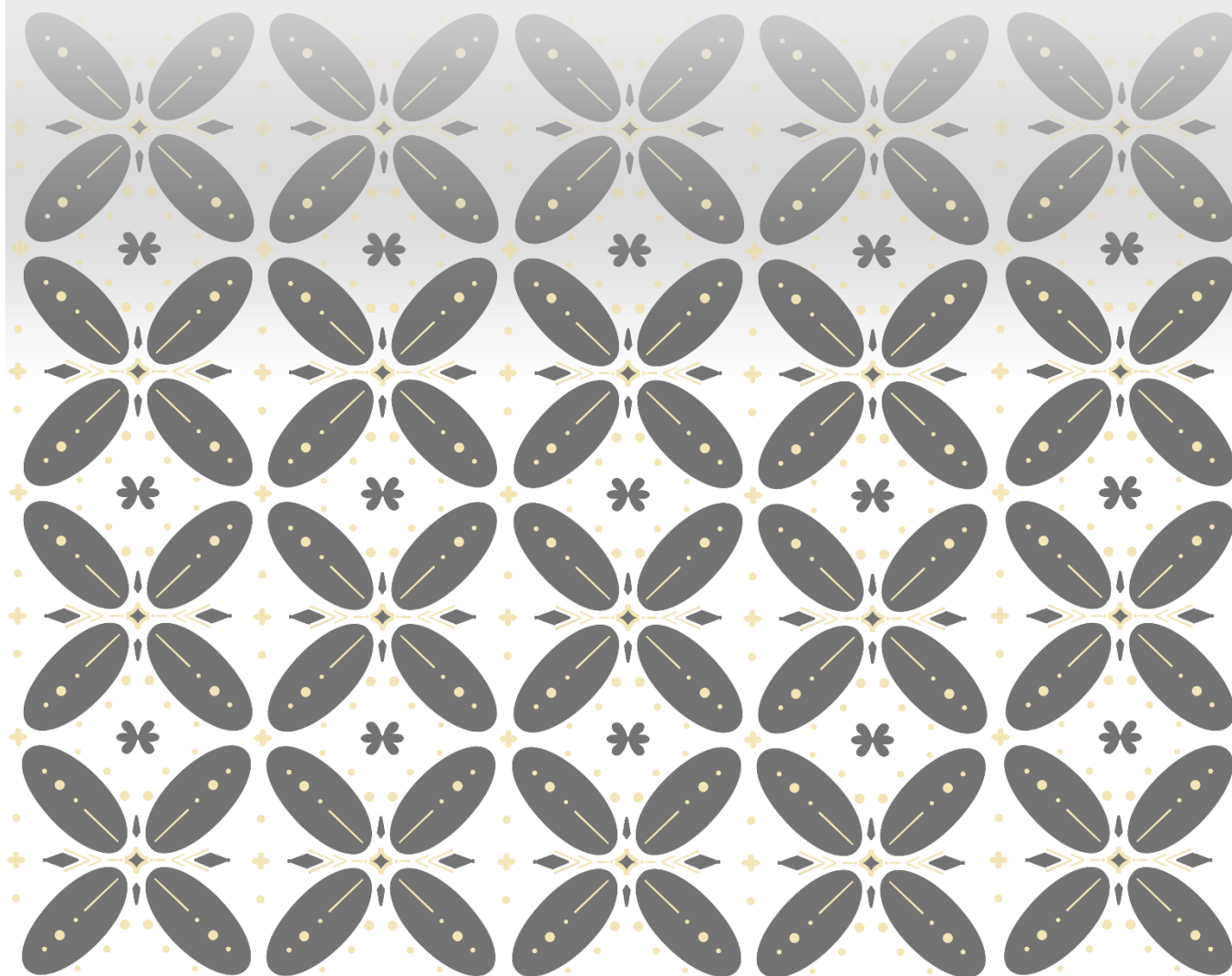






Bab 4

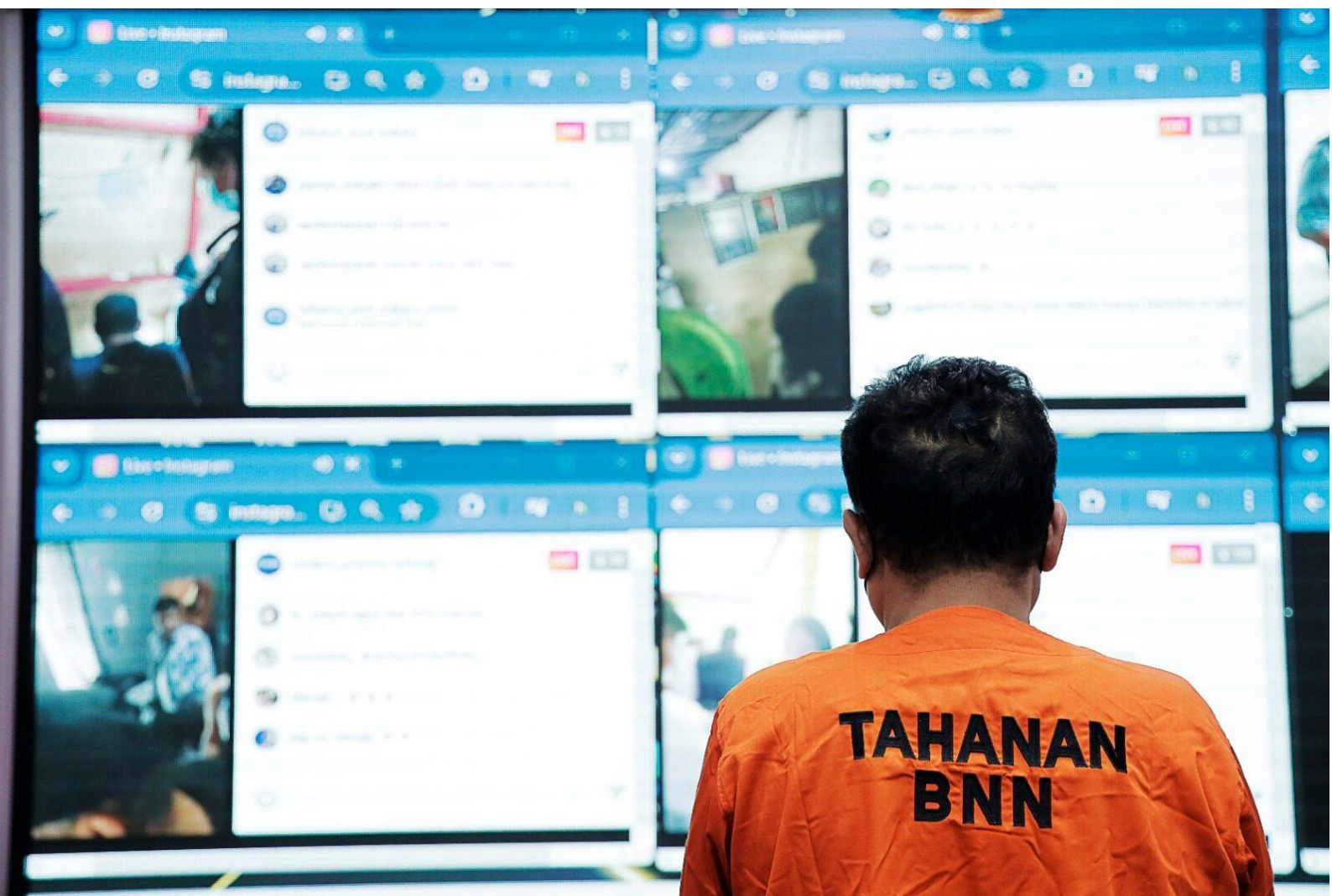
Penutup



Dokumen Renja BNN Tahun 2025 merupakan gambaran informasi dari seluruh program kerja, pengalokasian anggaran, serta penyusunan target kinerja dari seluruh unit penanggung jawab kinerja. Dokumen Renja BNN Tahun 2025 juga menjadi dokumen sumber untuk dijabarkan dalam renja seluruh unit organisasi di lingkungan BNN baik Unit Kerja Eselon (UKE) I, UKE II Tingkat Pusat, Unit Kerja Mandiri (UKM), serta Unit Kerja Vertikal BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

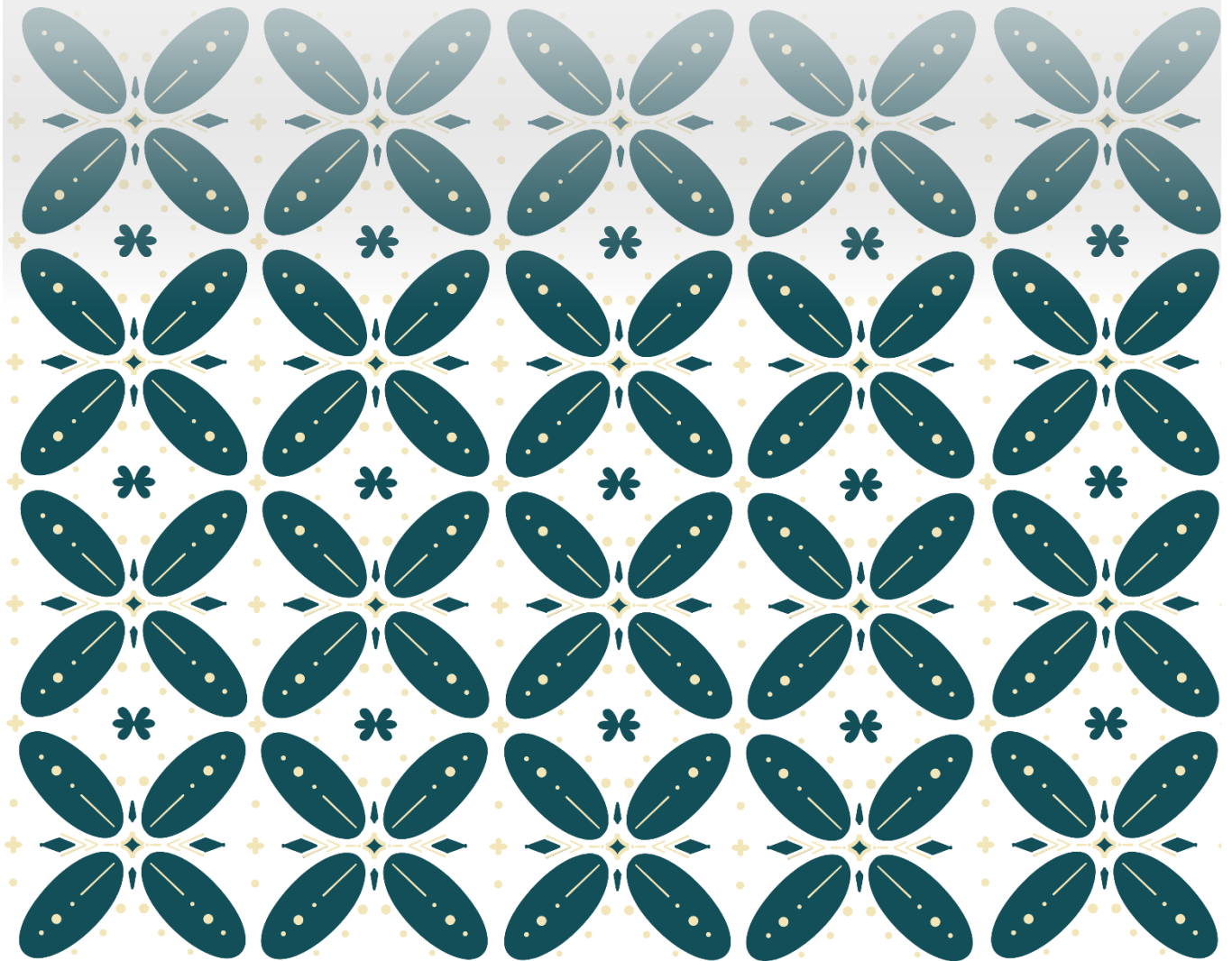
Demikian dokumen Renja BNN Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian dari kesinambungan proses pencapaian sasaran strategis *“Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”* dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).







Lampiran



LAMPIRAN I
DAFTAR PROYEK PRIORITAS NASIONAL BNN TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO PRIORITAS	TARGET	SATUAN	PAGU	UNIT PELAKSANA
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)				
1	3247 - Penyelenggaraan Advokasi				
	QDE - Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga				
	001 - Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga	4280	Keluarga	7.488.000.000	Dit. Advokasi
	UBB - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				
	001 - Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	214	Desa	8.564.000.000	Dit. Advokasi
2	5936 - Pengelolaan Informasi dan Edukasi				
	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
	001 - Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan	392	Lembaga	3.683.361.000	Dit. I & E
	SCJ - Pelatihan Bidang Sosial				
	001 - Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan	1910	Orang	10.788.639.000	Dit. I & E
3	3248 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif				
	QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
	001 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	9	Kelompok Masyarakat	2.147.042.000	Dit. Dayatif
	002 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba	81	Kelompok Masyarakat	9.093.805.000	Dit. Dayatif
4	3256 - Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba				
	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat				
	001 - Layanan Pascarehabilitasi/Bina Lanjut Penyalahguna Narkotika	6755	Orang	5.899.019.000	Dit. Pascarehab
	RAB - Sarana Bidang Kesehatan				
	004 - Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi	1	Unit	268.720.000	Dit. Pascarehab
5	3259 - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah				
	SCM - Pelatihan Bidang Kesehatan				
	001 - Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi	1090	Orang	3.024.079.000	Dit. PLRIP



NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO PRIORITAS	TARGET	SATUAN	PAGU	UNIT PELAKSANA
6	3260 - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat				
	PDD - Standarisasi Lembaga				
	001 - Fasilitas Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi	20	Lembaga	1.337.143.000	Dit. PLRKM
	QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
	001 - Fasilitas Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	225	Kelompok Masyarakat	5.939.502.000	Dit. PLRKM
	RBV - Prasarana Bidang Kesehatan				
	001 - Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap	4	Unit	445.714.000	Dit. PLRKM
7	3258 - Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti				
	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat				
	001 - Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	40	Orang	1.864.160.000	Dit. Wastahti
	002 - Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	6722	Orang	12.135.840.000	Dit. Wastahti
	Program Dukungan Manajemen				
8	3242 - Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN				
	PBN - Kebijakan Bidang Sosial				
	001 - Rekomendasi Kebijakan Penanganan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	1	Rekomendasi Kebijakan	36.671.776.000	Pus. Litdatin
TOTAL ANGGARAN PRIORITAS				109.350.800.000	



LAMPIRAN II
RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN 2025

KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	56,39	Kepala BNN
2	Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	81	Kepala BNN
066.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	80	Settama
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	84	
		Opini Kepercayaan Publik Terhadap BNN	85	
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan menuju WBK/WBBM	15	Ittama
		Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	4	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			Biro Keuangan
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur	Nilai Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja	100	
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia			Biro SDMA Ortala
	Meningkatnya Pengelolaan SDM, Organisasi dan Tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian (skala 4)	3,1	
		Persentase Penilaian atas Efektivitas Penataan Tatalaksana	74	
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN			Biro Perencanaan
	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	93	
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana			Biro Umum
	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3,3	
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa	3,3	



KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja			
	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja serta Pengawasan, Penegakan Disiplin, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100	Inspektorat I
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 pada wilayah Pengawasan I	3	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal pada wilayah Pengawasan I	A	
		Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan II yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100	Inspektorat II
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 pada wilayah Pengawasan II	3	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal pada wilayah Pengawasan II	A	
		Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100	Inspektorat III
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75 pada wilayah Pengawasan III	3	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal pada wilayah Pengawasan III	A	
		Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu	100	Inspektorat Pengawasan Khusus
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	A	
3242	Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN			
	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan layanan penyediaan data dan informasi	Indek kualitas layanan teknologi informasi komunikasi dan penyediaan data P4GN	3,5	Puslitdatin
		Indek kepuasan hasil penelitian dan pengembangan bidang P4GN	3,75	
3244	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan			
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN	Presentase pegawai BNN yang telah memenuhi kompetensi jabatan	25	PPSDM
		Indeks kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di PPSDM BNN	3,8	



KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan			Biro Humpro
	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleraan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan	3,65	
		Presentase Tingkat Kepuasan Layanan Protokoler	80	
066.BL	PROGRAM P4GN			
1	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	Dep. Bidang Pencegahan
2	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	150	Dep. Bidang Dayamas
3	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	3,61	Dep. Bidang Rehabilitasi
		Persentase penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	
4	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang diungkap	Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diungkap	35	Dep. Bidang Pemberantasan
		Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	100	
5	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	4	Dep. Bidang Huker
		Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100	
3247	Penyelenggaraan Advokasi			Dit. Advokasi
	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78,7	
3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif			Dit Dayatif
	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari 'Bahaya/Waspada' menjadi 'Waspada/Siaga/Aman'	16	
3250	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum			Dit. Hukum
	Meningkatnya layanan litigasi dan pembinaan hukum	Indeks Regulasi Bidang P4GN	4	
		Indeks Pelayanan Bantuan Hukum	4	
3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi			Dit. Intelijen
	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	30	
3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat			Dit. Interdiksi
	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	40	



KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3253	Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri			Dit. Kerjasama
	Meningkatnya jalinan kerjasama BNN dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri	Persentase Kerjasama yang efektif	100	
3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba			Dit. Pascarehabilitasi
	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kapabilitas rehabilitasi	3,3	
		Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,4	
3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat			Dit. PSM
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,35	
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti			Dit. Wastahti
	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah			Dit. PLRIP
	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis	50	
		Petugas Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Terlatih	1035	
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat			Dit. PLRKM
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	8	
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	219	
3261	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran			Dit. Dakjar
	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU yang tertangkap	100	
		Persentase Target Operasi (TO) kasus tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU yang tertangkap	100	
3262	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor			Dit. PP
	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	4	
		Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	100	
		Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	7	



KODE	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba			Balai/Loka Rehabilitasi
	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	3,2	
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika			Dit. Narkotika
	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	190	
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	6	
5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika			Dit. TPPU
	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P 21	8	
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi			Dit. Informasi Edukasi
	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	53,51	
6239	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika			Pusat Laboratorium Uji Narkoba
	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	91	
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	
		Jumlah metode pengujian baru	1	
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang ter publikasi	1	



LAMPIRAN III

ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BNN TAHUN 2025

KODE		PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN			%
			RM	PNBP	TOTAL	
066.BL		BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.440.439.802.000	14.641.585.000	2.455.081.387.000	100%
A	066.01	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	356.820.178.000	14.641.585.000	371.461.763.000	15,13%
1	3247	Penyelenggaraan Advokasi	24.596.327.000		24.596.327.000	1,00%
2	3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	13.055.990.000		13.055.990.000	0,53%
3	3250	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	5.635.980.000		5.635.980.000	0,23%
4	3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	73.646.171.000		73.646.171.000	3,00%
5	3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	13.400.097.000		13.400.097.000	0,55%
6	3253	Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri	4.785.976.000		4.785.976.000	0,19%
7	3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	7.886.355.000		7.886.355.000	0,32%
8	3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	32.589.939.000		32.589.939.000	1,33%
9	3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	23.088.056.000		23.088.056.000	0,94%
10	3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	9.646.436.000		9.646.436.000	0,39%
11	3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	19.038.767.000	14.418.519.000	33.457.286.000	1,36%
12	3261	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	20.555.052.000		20.555.052.000	0,84%
13	3262	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	5.179.933.000	81.490.000	5.261.423.000	0,21%
14	4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	21.177.185.000	42.192.000	21.219.377.000	0,86%
15	5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	49.856.386.000		49.856.386.000	2,03%
16	5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	8.966.594.000		8.966.594.000	0,37%
17	5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	19.550.674.000		19.550.674.000	0,80%
18	6239	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	4.164.260.000	99.384.000	4.263.644.000	0,17%
B	066.BW	Program Dukungan Manajemen	2.083.619.624.000	-	2.083.619.624.000	84,87%
1	3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	709.939.855.000		709.939.855.000	28,92%
2	3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	12.693.432.000		12.693.432.000	0,52%



KODE		PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN			%
			RM	PNBP	TOTAL	
3	3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	19.462.240.000		19.462.240.000	0,79%
4	3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1.272.481.316.000		1.272.481.316.000	51,83%
5	3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	8.195.111.000		8.195.111.000	0,33%
6	3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	7.117.680.000		7.117.680.000	0,29%
7	3242	Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN	40.069.342.000		40.069.342.000	1,63%
8	3244	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	13.660.648.000		13.660.648.000	0,56%



LAMPIRAN IV

DAFTAR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) KEGIATAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL		2.455.081.387.000
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	371.461.763.000
1	3247 - Penyelenggaraan Advokasi	24.596.327.000
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8.544.327.000
	001 - Petunjuk Teknis Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	4.017.798.000
	002 - Petunjuk Teknis Advokasi Program Ketahanan Keluarga anti Narkoba Berbasis Sumber daya Pembangunan Desa	4.526.529.000
	QDE - Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	7.488.000.000
	001 - Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga	7.488.000.000
	UBB - Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Desa	8.564.000.000
	001 - Fasilitas Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	8.564.000.000
2	3248 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	13.055.990.000
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.815.143.000
	001 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif	1.815.143.000
	QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	11.240.847.000
	001 - Fasilitas Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	2.147.042.000
	002 - Fasilitas Pengembangan Potensi Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkoba	9.093.805.000
3	3250 - Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	5.635.980.000
	AAH - Peraturan lainnya	735.166.000
	001 - Peraturan Badan Narkotika Nasional	373.803.000
	002 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional	361.363.000
	ABD - Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1.700.000.000
	001 - Rekomendasi Kebijakan Rancangan UU Narkotika	1.700.000.000
	ABE - Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	366.017.000
	001 - Rekomendasi Bidang Hukum P4GN	366.017.000
	AEA - Koordinasi	303.017.000
	001 - Koordinasi	303.017.000
	BBA - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	507.939.000
	001 - Layanan Bantuan Hukum P4GN Perseorangan	507.939.000
	BBB - Layanan Bantuan Hukum Lembaga	783.794.000
	001 - Layanan Bantuan Hukum P4GN Lembaga	783.794.000
	BBC - Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	77.024.000
	001 - Layanan Bantuan Hukum P4GN Kelompok Masyarakat	77.024.000
	BCB - Perkara Hukum Lembaga	963.023.000
	001 - Pemberian Asistensi Peradilan	963.023.000
	BMA - Data dan Informasi Publik	200.000.000
	001 - Layanan JDIH BNN	200.000.000
4	3251 - Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	73.646.171.000
	BAK - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	73.646.171.000
	001 - Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	63.146.171.000
	002 - Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Unit Vertikal)	10.500.000.000
5	3252 - Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat	13.400.097.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN
	BCA - Perkara Hukum Perseorangan	13.400.097.000
	001 - Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Pintu Masuk Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Perairan, Darat dan Lintas Batas Wilayah Indonesia	13.400.097.000
6	3253 - Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri	4.785.976.000
	AEA - Koordinasi	1.343.363.000
	001 - Pembinaan Teknis Kerja Sama Bidang P4GN	116.856.000
	002 - Asistensi Kerjasama Bidang P4GN	632.487.000
	003 - Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang P4GN	594.020.000
	AEC - Kerja sama	2.376.915.000
	001 - Kerja Sama Luar Negeri Bidang P4GN	2.376.915.000
	AED - Perjanjian	1.065.698.000
	001 - Perjanjian Kerja Sama Bidang P4GN	1.065.698.000
7	3256 - Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	7.886.355.000
	ABG - Kebijakan Bidang Kesehatan	1.465.116.000
	001 - Kepuasan Layanan Rehabilitasi	444.820.000
	002 - Kapabilitas Lembaga Rehabilitasi	444.820.000
	003 - Efektivitas rehabilitasi	484.876.000
	004 - Koordinasi Program Rehabilitasi Berkelanjutan	90.600.000
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	253.500.000
	001 - NSPK Pascarehabilitasi	253.500.000
	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	5.899.019.000
	001 - Layanan Pascarehabilitasi/Bina Lanjut Penyalahguna Narkotika	5.899.019.000
	RAB - Sarana Bidang Kesehatan	268.720.000
	004 - Sistem Pendataan Penyalahgunaan Narkoba Terintegrasi	268.720.000
8	3257 - Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	32.589.939.000
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6.314.764.000
	001 - Petunjuk Pelaksanaan KOTAN	6.314.764.000
	BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	26.275.175.000
	001 - Fasilitasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	26.275.175.000
9	3258 - Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	23.088.056.000
	BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	4.034.372.000
	001 - Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	3.171.025.000
	002 - Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika (unit Vertikal)	863.347.000
	BIB - Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5.053.684.000
	001 - Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	1.485.368.000
	002 - Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU (Unit Vertikal)	3.568.316.000
	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	14.000.000.000
	001 - Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	1.864.160.000
	002 - Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	12.135.840.000
10	3259 - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	9.646.436.000
	ADI - Sertifikasi Profesi dan SDM	6.324.863.000
	001 - Tenaga Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kompetensi Teknis	2.126.358.000
	002 - Tenaga Fasilitator Rehabilitasi yang Diberikan Peningkatan Kemampuan Teknis	4.198.505.000
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	297.494.000
	001 - Modul Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi	297.494.000
	SCM - Pelatihan Bidang Kesehatan	3.024.079.000
	001 - Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi	3.024.079.000
11	3260 - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	33.457.286.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	24.992.407.000	
	001 - Layanan Rehabilitasi di BNN	1.440.048.000	
	002 - Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	9.133.840.000	
	003 - Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	14.407.099.000	
	004 - Layanan pemeriksaan psikologi tipe-A	4.870.000	
	005 - Layanan pemeriksaan psikologi Tipe-B	6.550.000	
	BDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	742.520.000	
	001 - Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	742.520.000	
	PDD - Standarisasi Lembaga	1.337.143.000	
	001 - Fasilitas Pemenuhan Standar Nasional Lembaga Rehabilitasi	1.337.143.000	
	QDD - Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.939.502.000	
	001 - Fasilitas Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	5.939.502.000	
	RBV - Prasarana Bidang Kesehatan	445.714.000	
	001 - Prasarana Rehabilitasi Rawat Inap	445.714.000	
12	3261 - Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran		20.555.052.000
	BHB - Operasi Bidang Keamanan	20.555.052.000	
	001 - Operasi Penangkapan DPO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU	9.297.802.000	
	002 - Operasi Penangkapan TO Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta TPPU	11.257.250.000	
13	3262 - Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor		5.261.423.000
	BCA - Perkara Hukum Perseorangan	3.184.723.000	
	001 - Berkas Perkara Tindak Pidana Prekursor Narkotika	3.184.723.000	
	BKA - Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1.388.730.000	
	001 - Laporan Hasil Penyelidikan Psikotropika dan NPS	1.388.730.000	
	BKC - Pemantauan lembaga	687.970.000	
	001 - Laporan hasil pengawasan Importir dan pengguna akhir prekursor narkotika	687.970.000	
14	4020 - Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika		21.219.377.000
	BAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	21.219.377.000	
	001 - Layanan Rehabilitasi Pilihan di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1.187.172.000	
	002 - Layanan Rehabilitasi Pilihan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	485.890.000	
	003 - Layanan Rehabilitasi Pilihan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	185.284.000	
	004 - Layanan Rehabilitasi Pilihan di Loka Rehabilitasi BNN Batam	105.900.000	
	005 - Layanan Rehabilitasi Pilihan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	232.169.000	
	006 - Layanan Rehabilitasi Pilihan di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	301.147.000	
	019 - Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkotika dan Penelitian di Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi	42.192.000	
	U01 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Kondisi Khusus di Balai Besar Rehabilitasi BNN	67.650.000	
	U02 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Besar Rehabilitasi BNN	2.407.190.000	
	U03 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Besar Rehabilitasi BNN	4.993.940.000	
	U05 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1.246.690.000	
	U06 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1.548.010.000	
	U08 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Berat di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	2.123.040.000	
	U09 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Sedang di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	996.040.000	
	U11 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1.140.754.000	
	U12 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Batam	860.548.000	
	U14 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	711.475.000	
	U15 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	997.888.000	
	U17 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Berat di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	374.164.000	
	U18 - Program Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika dengan Tingkat Keparahan Sedang di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1.212.234.000	
15	5354 - Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika		49.856.386.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
	BCA - Perkara Hukum Perseorangan	40.826.928.000	
	001 - Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	8.264.968.000	
	002 - Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	32.561.960.000	
	BHB - Operasi Bidang Keamanan	9.029.458.000	
	001 - Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	7.604.458.000	
	002 - Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)	1.425.000.000	
16	5355 - Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika		8.966.594.000
	BCA - Perkara Hukum Perseorangan	8.966.594.000	
	001 - Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	8.966.594.000	
17	5936 - Pengelolaan Informasi dan Edukasi		19.550.674.000
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5.078.674.000	
	001 - Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Edukasi	5.078.674.000	
	QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	3.683.361.000	
	001 - Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Satuan Pendidikan	3.683.361.000	
	SCJ - Pelatihan Bidang Sosial	10.788.639.000	
	001 - Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan	10.788.639.000	
18	6239 - Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika		4.263.644.000
	ADD - Standarisasi Lembaga	487.233.000	
	001 - Layanan Mutu Laboratorium Narkotika	487.233.000	
	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	99.384.000	
	001 - Layanan Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali tembakau dan alkohol	87.236.000	
	002 - Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika	11.676.000	
	003 - Layanan Penggunaan Instrumen untuk Keperluan Analisis	472.000	
	BJA - Penyidikan dan Pengujian Produk	3.677.027.000	
	001 - Identifikasi Narkotika	629.027.000	
	U01 - Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	3.048.000.000	
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen		2.083.619.624.000
1	3236 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan		709.939.855.000
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	702.643.539.000	
	994 - Layanan Perkantoran	702.643.539.000	
	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.296.316.000	
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	7.296.316.000	
2	3237 - Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia		12.693.432.000
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.167.510.000	
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.167.510.000	
	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	11.525.922.000	
	954 - Layanan Manajemen SDM	11.525.922.000	
3	3238 - Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN		19.462.240.000
	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.462.240.000	
	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.645.177.000	
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.817.063.000	
4	3239 - Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana		1.272.481.316.000
	CAF - Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	723.732.416.000	
	001 - Dukungan Teknologi P4GN	723.732.416.000	
	CCF - OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	45.000.000.000	
	001 - Pemeliharaan Alat Khusus Teknologi Intelijen	34.403.391.000	



NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	ANGGARAN	
	002 - Pemeliharaan Sarana Operasi Interdiksi	3.428.981.000	
	003 - Pemeliharaan dan Perawatan Unit K-9 Satwa Pelacak	4.252.000.000	
	004 - Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan War Room	189.470.000	
	005 - Kalibrasi Instrumen dan Peralatan Laboratorium	350.000.000	
	006 - Pemeliharaan dan Perawatan Alat Direktorat Wastahti	383.158.000	
	007 - Pemeliharaan sarana operasi Direktorat Penindakan dan Pengejaran	1.993.000.000	
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	464.019.293.000	
	956 - Layanan BMN	1.281.960.000	
	962 - Layanan Umum	52.158.633.000	
	994 - Layanan Perkantoran	410.578.700.000	
	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37.230.350.000	
	951 - Layanan Sarana Internal	35.382.950.000	
	971 - Layanan Prasarana Internal	1.847.400.000	
	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.499.257.000	
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	2.499.257.000	
5	3241 - Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja		7.117.680.000
	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.117.680.000	
	965 - Layanan Audit Internal	7.117.680.000	
6	3242 - Penyelenggaraan Penelitian, Data, dan Informasi P4GN		40.069.342.000
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.397.566.000	
	963 - Layanan data dan informasi	3.397.566.000	
	PBN - Kebijakan Bidang Sosial	36.671.776.000	
	001 - Rekomendasi Kebijakan Penanganan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	36.671.776.000	
7	3244 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan		13.660.648.000
	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	13.660.648.000	
	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	13.660.648.000	
8	3979 - Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan		8.195.111.000
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.195.111.000	
	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6.447.350.000	
	959 - Layanan Protokoler	1.747.761.000	



LAMPIRAN V

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN UNIT KERJA PUSAT, BNNP, DAN BNNK TAHUN 2025

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	KODE SATKER	SATKER	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
1	15405	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	82.040.000	10.820.000	31.491.000	1.139.110.000	5.000.000			
2	15515	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	73.280.000	10.820.000	31.491.000	1.137.363.000	5.000.000			
3	20558	BNN KABUPATEN BOGOR	83.832.000	10.580.000	39.013.000	1.151.665.000	5.000.000			
4	20761	BNN KABUPATEN CIANJUR	68.572.000	10.580.000	38.833.000	1.146.647.000	5.000.000			
5	25137	BNN KOTA BANDUNG	73.880.000	10.580.000	32.437.000	1.409.571.000	5.000.000			
6	25447	BNN KOTA CIREBON	88.852.000	10.580.000	39.223.000	1.123.926.000	5.000.000			
7	26118	BNN KOTA CIMAHI	80.244.000	10.580.000	38.551.000	1.141.244.000	5.000.000			
8	31963	BNN KABUPATEN MAGELANG	78.580.000	10.180.000	32.585.000	910.935.000	5.000.000			
9	32057	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	74.752.000	10.180.000	32.585.000	963.746.000	5.000.000			
10	35665	BNN KOTA SURAKARTA	102.800.000	10.180.000	32.615.000	1.054.700.000	5.000.000			
11	40173	BNN KABUPATEN BANTUL	73.465.000	10.180.000	35.713.000	812.292.000	5.000.000			
12	40256	BNN KABUPATEN SLEMAN	81.850.000	10.180.000	35.413.000	1.037.165.000	5.000.000			
13	45165	BNN KOTA YOGYAKARTA	70.336.000	10.180.000	28.243.000	999.823.000	5.000.000			
14	52858	BNN KABUPATEN TUBAN	73.368.000	10.740.000	36.567.000	935.197.000	5.000.000			
15	60534	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	77.760.000	10.500.000	35.998.000	1.093.140.000	5.000.000			
16	61331	BNN KABUPATEN GAYO LUES	55.620.000	10.500.000	36.268.000	1.176.462.000	5.000.000			
17	61818	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	84.720.000	10.500.000	35.278.000	1.161.572.000	5.000.000			
18	65137	BNN KOTA BANDA ACEH	78.360.000	10.500.000	28.798.000	1.031.682.000	5.000.000			
19	70258	BNN KABUPATEN KARO	62.478.000	9.460.000	48.998.000	1.170.305.000	5.000.000			
20	70545	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	82.774.000	10.260.000	37.428.000	888.779.000	5.000.000			
21	70639	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	64.906.000	10.260.000	37.644.000	813.119.000	5.000.000			
22	72117	BNN KABUPATEN BATU BARA	63.898.000	10.260.000	37.194.000	945.558.000	5.000.000			
23	75345	BNN KOTA BINJAI	73.548.000	10.260.000	36.924.000	1.207.952.000	5.000.000			
24	75540	BNN KOTA TANJUNG BALAI	81.698.000	10.260.000	46.399.000	1.086.228.000	5.000.000			
25	81240	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	92.562.000	10.340.000	30.131.000	891.471.000	5.000.000			
26	91236	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	127.120.000	10.260.000	36.248.000	1.105.247.000	5.000.000			
27	111079	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	62.726.000	10.340.000	38.125.000	829.299.000	5.000.000			
28	120855	BNN KABUPATEN WAY KANAN	76.510.000	10.180.000	31.756.000	777.107.000	5.000.000			
29	130761	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	106.896.000	10.260.000	35.040.000	1.235.332.000	5.000.000			
30	145161	BNN KOTA PALANGKARAYA	60.680.000	10.100.000	27.515.000	1.185.502.000	5.000.000			
31	150243	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	60.879.000	10.260.000	33.819.000	819.170.000	5.000.000			
32	150751	BNN KABUPATEN TABALONG	80.718.000	10.260.000	34.023.000	920.056.000	5.000.000			
33	150958	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	81.698.000	10.260.000	33.927.000	801.700.000	5.000.000			
34	165162	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH	67.271.000	258.750.000		7.105.347.000				
35	165249	BNN KOTA BALIKPAPAN	83.788.000	10.980.000	37.089.000	1.318.748.000	5.000.000			
36	165352	BNN KOTA TARAKAN	58.408.000	10.580.000	26.733.000	1.190.925.000	5.000.000			
37	165441	BNN KOTA BONTANG	96.024.000	10.980.000	37.389.000	824.157.000	5.000.000			
38	190633	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	88.440.000	10.980.000	36.654.000	1.071.625.000	5.000.000			
39	195175	BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	96.336.000	433.490.000	21.611.000	7.345.103.000				
40	205232	BNN KOTA BAU-BAU	104.820.000	10.580.000	38.020.000	862.360.000	5.000.000			



NO	KODE SATKER	SATKER	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
41	220155	BNN KABUPATEN BULELENG	74.176.000	10.580.000	35.646.000	796.794.000	5.000.000			
42	220348	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	42.528.000	10.580.000	40.156.000	990.258.000	5.000.000			
43	220547	BNN KABUPATEN KARANGASEM	49.040.000	10.580.000	40.384.000	816.870.000	5.000.000			
44	295420	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	75.956.000	10.500.000	38.091.000	1.645.688.000	5.000.000			
45	310153	BNN KABUPATEN GORONTALO	84.590.000	7.100.000	26.220.000	817.687.000	5.000.000			
46	310721	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	71.810.000	10.100.000	33.520.000	855.163.000	5.000.000			
47	320229	BNN KABUPATEN KARIMUN	137.816.000	10.900.000	33.578.000	1.294.017.000	5.000.000			
48	325136	BNN KOTA BATAM	71.120.000	10.900.000	26.252.000	1.226.802.000	5.000.000			
49	352628	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	2.866.029.000		100.000.000	7.457.226.000				3.660.648.000
50	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	4.136.286.000		162.808.000	7.543.295.000				
51	403708	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.938.691.000	20.010.000	56.281.000	2.415.004.000	10.000.000			
52	403709	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	85.558.000	10.340.000	37.885.000	976.524.000	5.000.000			
53	403710	BNN KOTA DUMAI	64.784.000	10.260.000	36.848.000	1.040.178.000	5.000.000			
54	403711	BNN KOTA TANGERANG	71.380.000	10.500.000	37.887.000	1.239.983.000	5.000.000			
55	403713	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	57.638.000	10.420.000	35.742.000	831.059.000	5.000.000			
56	403714	BNN KABUPATEN SUMEDANG	69.532.000	10.580.000	38.923.000	966.666.000	5.000.000			
57	403715	BNN KABUPATEN PASURUAN	47.920.000	10.740.000	34.360.000	821.744.000	5.000.000			
58	403716	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	64.782.000	10.580.000	35.861.000	853.689.000	5.000.000			
59	403717	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	71.270.000	174.620.000	15.688.000	4.579.218.000				
60	418305	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	81.320.000	10.500.000	35.938.000	1.070.638.000	5.000.000			
61	418307	BNN KABUPATEN PIDIE	80.000.000	10.500.000	35.188.000	1.056.734.000	5.000.000			
62	418308	BNN KOTA TEBING TINGGI	68.490.000	10.260.000	37.062.000	994.602.000	5.000.000			
63	418309	BNN KABUPATEN SOLOK	68.322.000	6.800.000	27.920.000	953.005.000	5.000.000			
64	418310	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	102.902.000	10.340.000	38.065.000	944.333.000	5.000.000			
65	418311	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	60.618.000	10.340.000	38.575.000	985.895.000	5.000.000			
66	418313	BNN KOTA BENGKULU	79.696.000	10.180.000	29.404.000	869.055.000	5.000.000			
67	418315	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	64.654.000	10.180.000	31.612.000	851.537.000	5.000.000			
68	418316	BNN KOTA METRO	69.136.000	10.180.000	31.540.000	765.251.000	5.000.000			
69	418317	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	81.872.000	10.580.000	39.193.000	963.147.000	5.000.000			
70	418318	BNN KOTA TASIKMALAYA	82.912.000	10.580.000	39.013.000	932.118.000	5.000.000			
71	418319	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	68.251.000	10.260.000	34.530.000	1.102.963.000	5.000.000			
72	418320	BNN KABUPATEN NUNUKAN	52.432.000	10.580.000	34.707.000	1.062.667.000	5.000.000			
73	418322	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	67.554.000	10.260.000	33.819.000	923.746.000	5.000.000			
74	418323	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	58.340.000	10.980.000	35.592.000	972.152.000	5.000.000			
75	418324	BNN KABUPATEN SUMBAWA	89.582.000	10.340.000	43.488.000	861.295.000	5.000.000			
76	418537	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIAU		208.650.000	7.440.000	6.988.964.000				
77	418543	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG SELATAN	71.230.000	169.100.000		4.738.872.000				
78	419175	BNN KOTA SABANG	120.916.000	10.500.000	36.064.000	1.032.577.000	5.000.000			
79	419176	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	142.702.000	10.260.000	44.628.000	1.124.889.000	5.000.000			
80	419177	BNN KOTA SAWAHLUNTO	103.562.000	10.340.000	29.921.000	1.128.782.000	5.000.000			
81	419202	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82.322.000	10.340.000	37.885.000	1.076.705.000	5.000.000			
82	419203	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81.080.000	10.340.000	32.635.000	1.025.319.000	5.000.000			
83	419222	BNN KABUPATEN PELALAWAN	65.364.000	10.260.000	30.220.000	1.130.963.000	5.000.000			
84	419223	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	68.012.000	10.180.000	36.340.000	1.057.072.000	5.000.000			
85	419224	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	70.000.000	10.180.000	31.576.000	1.083.178.000	5.000.000			
86	419225	BNN KABUPATEN BANGKA	107.538.000	10.420.000	35.592.000	1.201.590.000	5.000.000			
87	419226	BNN KOTA CILEGON	83.568.000	10.500.000	36.969.000	1.037.473.000	5.000.000			
88	419227	BNN KABUPATEN SUKABUMI	81.172.000	10.580.000	38.899.000	1.209.434.000	5.000.000			
89	419228	BNN KOTA TEGAL	81.700.000	10.180.000	32.705.000	1.034.918.000	5.000.000			



NO	KODE SATKER	SATKER	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
90	419246	BNN KABUPATEN BANYUMAS	74.588.000	10.180.000	32.687.000	1.085.693.000	5.000.000			
91	419247	BNN KABUPATEN SUMENEP	81.968.000	10.740.000	36.627.000	942.563.000	5.000.000			
92	419248	BNN KOTA MOJOKERTO	66.208.000	10.740.000	36.447.000	934.794.000	5.000.000			
93	419249	BNN KABUPATEN SINTANG	80.116.000	10.260.000	35.772.000	1.192.735.000	5.000.000			
94	419256	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	73.398.000	10.100.000	34.649.000	954.610.000	5.000.000			
95	419257	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	60.594.000	10.260.000	33.819.000	1.091.327.000	5.000.000			
96	419258	BNN KOTA JAKARTA UTARA	82.040.000	10.820.000	31.491.000	1.224.812.000	5.000.000			
97	419259	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81.652.000	10.980.000	35.656.000	1.197.640.000	5.000.000			
98	419260	BNN KABUPATEN BONE	78.450.000	10.980.000	35.994.000	1.035.484.000	5.000.000			
99	419261	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	76.598.000	10.340.000	38.858.000	1.183.224.000	5.000.000			
100	419262	BNN KABUPATEN MUNA	89.044.000	10.580.000	38.716.000	1.020.761.000	5.000.000			
101	419263	BNN KABUPATEN BOALEMO	77.126.000	10.100.000	33.820.000	1.070.260.000	5.000.000			
102	419264	BNN KABUPATEN BIMA	70.262.000	10.340.000	44.988.000	1.015.604.000	5.000.000			
103	419265	BNN KABUPATEN BELU	82.424.000	10.660.000	38.990.000	1.120.461.000	5.000.000			
104	419279	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	69.054.000	10.820.000	36.451.000	1.132.704.000	5.000.000			
105	419280	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	73.120.000	10.900.000	36.852.000	1.215.818.000	5.000.000			
106	419286	BNN KABUPATEN MIMIKA	78.920.000	11.540.000	53.035.000	1.203.953.000	5.000.000			
107	648961	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI				8.648.606.000			40.069.342.000	
108	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	9.916.040.000	361.410.000	130.462.000	24.830.396.000	300.594.000			
109	681595	SEKRETARIAT UTAMA	429.780.314.000	8.601.920.000	11.469.577.000	99.807.420.000	6.643.937.000			
110	681600	INSPEKTORAT UTAMA				5.443.236.000		7.117.680.000		
111	681617	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN				2.770.444.000				
112	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				1.252.709.000				
113	681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN				783.679.117.000				
114	681642	DEPUTI BIDANG REHABILITASI				21.356.879.000				
115	681659	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA				951.214.000				
116	682448	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	6.596.523.000	20.640.000	39.635.000	2.920.526.000	10.000.000			
117	682452	BNN PROVINSI BANTEN	4.735.364.000	19.800.000	39.265.000	2.908.420.000	10.000.000			
118	682469	BNN PROVINSI JAWA BARAT	18.344.388.000	20.010.000	46.745.000	4.209.750.000	10.000.000			
119	682473	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	15.607.453.000	18.960.000	37.341.000	2.738.756.000	10.000.000			
120	682480	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	16.297.224.000	20.430.000	45.203.000	3.367.496.000	10.000.000			
121	682494	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9.828.442.000	18.960.000	51.245.000	2.513.314.000	15.000.000			
122	682502	BNN PROVINSI LAMPUNG	8.268.548.000	19.260.000	34.122.000	2.796.003.000	10.000.000			
123	682516	BNN PROVINSI BALI	4.332.243.000	23.010.000	40.158.000	2.600.102.000	29.700.000			
124	682520	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5.742.243.000	19.380.000	39.584.000	2.083.658.000	10.000.000			
125	682537	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3.338.100.000	20.220.000	39.540.000	2.309.663.000	10.000.000			
126	682541	BNN PROVINSI ACEH	15.780.096.000	19.800.000	39.534.000	2.379.190.000	10.000.000			
127	682558	BNN PROVINSI BENGKULU	4.943.533.000	18.960.000	36.508.000	3.108.798.000	10.000.000			
128	682562	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	13.366.882.000	19.380.000	42.389.000	2.539.114.000	10.000.000			
129	682579	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	20.419.232.000	19.170.000	43.006.000	2.636.231.000	10.000.000			
130	682583	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	4.989.418.000	19.380.000	31.569.000	2.276.172.000	10.000.000			
131	682590	BNN PROVINSI JAMBI	4.180.293.000	19.380.000	34.841.000	3.124.619.000	10.000.000			
132	682605	BNN PROVINSI RIAU	5.397.696.000	17.050.000	51.540.000	3.490.595.000	25.200.000			
133	682612	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.268.807.000	19.590.000	36.920.000	2.375.927.000	10.000.000			
134	682626	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3.756.625.000	20.850.000	62.887.000	3.145.060.000	10.000.000			
135	682630	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5.373.147.000	19.170.000	38.600.000	2.583.921.000	10.000.000			
136	682647	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	7.032.364.000	19.170.000	37.159.000	2.779.523.000	10.000.000			
137	682651	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.557.614.000	21.060.000	36.851.000	2.690.308.000	10.000.000			
138	682668	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4.146.446.000	18.750.000	34.855.000	2.181.999.000	10.000.000			



NO	KODE SATKER	SATKER	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
139	682672	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	4.258.678.000	28.332.000	36.520.000	2.308.189.000	10.000.000			
140	682689	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	9.570.467.000	19.380.000	39.024.000	2.408.034.000	10.000.000			
141	682693	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	7.439.159.000	21.060.000	37.762.000	2.827.318.000	10.000.000			
142	682701	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	11.823.208.000	20.010.000	36.594.000	2.213.990.000	10.000.000			
143	682715	BNN PROVINSI GORONTALO	7.668.660.000	18.750.000	33.488.000	2.194.043.000	10.000.000			
144	682722	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	2.346.606.000	20.010.000	36.445.000	1.774.050.000	10.000.000			
145	682736	BNN PROVINSI MALUKU	3.837.224.000	20.640.000	36.821.000	2.619.859.000	10.000.000			
146	682740	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	7.377.771.000	20.850.000	54.808.000	2.232.592.000	10.000.000			
147	682757	BNN PROVINSI PAPUA	3.621.771.000	22.530.000	43.909.000	2.349.667.000	10.000.000			
148	682761	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	1.163.909.000	21.270.000	28.275.000	2.547.758.000	10.000.000			
149	682778	BNN KABUPATEN GARUT	60.614.000	10.580.000	39.001.000	1.141.461.000	5.000.000			
150	682782	BNN KABUPATEN KUNINGAN	75.292.000	10.580.000	37.910.000	1.142.827.000	5.000.000			
151	682799	BNN KABUPATEN CIAMIS	84.536.000	10.580.000	39.013.000	1.152.393.000	5.000.000			
152	682804	BNN KABUPATEN CILACAP	82.012.000	10.180.000	32.825.000	1.174.297.000	5.000.000			
153	682811	BNN KABUPATEN KENDAL	82.740.000	10.180.000	32.525.000	1.182.128.000	5.000.000			
154	682825	BNN KOTA MALANG	64.300.000	10.740.000	36.465.000	1.195.931.000	5.000.000			
155	682832	BNN KOTA BATU	71.196.000	10.740.000	36.549.000	1.252.005.000	5.000.000			
156	682846	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	75.768.000	10.740.000	36.567.000	1.221.076.000	5.000.000			
157	682850	BNN KABUPATEN NGANJUK	73.032.000	10.740.000	36.567.000	1.180.486.000	5.000.000			
158	682867	BNN KOTA MATARAM	46.700.000	10.340.000	29.784.000	903.101.000	5.000.000			
159	682871	BNN KOTA LHOKEUMAWA	66.788.000	10.500.000	35.488.000	1.226.145.000	5.000.000			
160	682888	BNN KOTA LANGSA	66.104.000	10.500.000	35.854.000	1.269.763.000	5.000.000			
161	682892	BNN KOTA PAGARALAM	111.039.000	10.340.000	38.335.000	1.176.911.000	5.000.000			
162	682900	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	88.260.000	10.340.000	38.395.000	1.109.222.000	5.000.000			
163	682914	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	112.600.000	10.340.000	38.545.000	1.066.552.000	5.000.000			
164	682921	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	66.200.000	8.810.000	41.660.000	1.183.339.000	5.000.000			
165	682935	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	76.642.000	10.260.000	37.194.000	1.155.460.000	5.000.000			
166	682942	BNN KABUPATEN LANGKAT	71.182.000	10.260.000	36.960.000	1.186.751.000	5.000.000			
167	682956	BNN KOTA PAYAKUMBUH	75.342.000	10.340.000	29.981.000	1.049.385.000	5.000.000			
168	682960	BNN KOTA PANGKAL PINANG	71.192.000	10.420.000	29.298.000	1.130.840.000	5.000.000			
169	682977	BNN KOTA TANJUNG PINANG	63.324.000	10.900.000	33.428.000	1.300.397.000	5.000.000			
170	682981	BNN KOTA PONTIANAK	84.800.000	10.260.000	29.472.000	1.178.272.000	5.000.000			
171	682998	BNN KOTA SINGKAWANG	85.944.000	10.260.000	34.962.000	1.216.715.000	5.000.000			
172	683000	BNN KOTA BANJARMASIN	68.120.000	10.260.000	27.717.000	1.128.150.000	5.000.000			
173	689011	BNN KOTA BANJARBARU	77.814.000	10.260.000	33.969.000	1.091.677.000	5.000.000			
174	689025	BNN KOTA SAMARINDA	81.096.000	10.980.000	27.075.000	1.276.623.000	5.000.000			
175	689032	BNN KABUPATEN MOROWALI	100.180.000	10.340.000	38.318.000	1.080.327.000	5.000.000			
176	689046	BNN KOTA PALOPO	89.250.000	10.980.000	36.654.000	1.085.923.000	5.000.000			
177	689050	BNN KABUPATEN KOLAKA	65.412.000	10.580.000	34.538.000	1.107.021.000	5.000.000			
178	689067	BNN KABUPATEN JAYAPURA	87.956.000	11.540.000	44.263.000	1.265.120.000	5.000.000			
179	689444	BNN KABUPATEN BIREUEN	71.900.000	10.500.000	35.368.000	1.300.788.000	5.000.000			
180	689451	BNN KABUPATEN ASAHAN	70.154.000	10.260.000	37.398.000	1.130.824.000	5.000.000			
181	689465	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	100.786.000	10.260.000	81.464.000	1.047.350.000	5.000.000			
182	689472	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	72.830.000	10.260.000	37.812.000	1.121.220.000	5.000.000			
183	689486	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	88.318.000	10.260.000	37.044.000	1.140.388.000	5.000.000			
184	689490	BNN KOTA PRABUMULIH	132.362.000	10.340.000	37.885.000	1.040.412.000	5.000.000			
185	689508	BNN KOTA JAMBI	80.624.000	10.340.000	29.365.000	1.031.284.000	5.000.000			
186	689512	BNN KABUPATEN BATANGHARI	103.780.000	10.340.000	32.545.000	1.120.641.000	5.000.000			
187	689529	BNN KOTA PEKANBARU	64.350.000	10.260.000	28.706.000	1.186.127.000	5.000.000			



NO	KODE SATKER	SATKER	3236	3237	3238	3239	3979	3241	3242	3244
188	689533	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	67.552.000	10.180.000	31.540.000	1.052.690.000	5.000.000			
189	689540	BNN KABUPATEN BELITUNG	67.034.000	10.420.000	38.172.000	1.206.458.000	5.000.000			
190	689554	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81.148.000	10.740.000	36.537.000	1.318.227.000	5.000.000			
191	689561	BNN KOTA DEPOK	91.152.000	10.580.000	39.193.000	1.232.317.000	5.000.000			
192	689575	BNN KABUPATEN KARAWANG	59.824.000	10.580.000	39.031.000	1.076.645.000	5.000.000			
193	689582	BNN KABUPATEN BATANG	79.060.000	10.180.000	32.585.000	1.169.008.000	5.000.000			
194	689596	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	65.476.000	10.180.000	32.765.000	1.116.923.000	5.000.000			
195	689601	BNN KOTA SURABAYA	76.160.000	10.740.000	16.036.000	1.182.503.000	5.000.000			
196	689618	BNN KOTA KEDIRI	86.528.000	10.740.000	36.347.000	1.200.087.000	6.440.000			
197	689622	BNN KABUPATEN MALANG	84.100.000	10.740.000	36.465.000	1.095.594.000	5.000.000			
198	689639	BNN KABUPATEN GRESIK	85.096.000	10.740.000	36.447.000	1.047.840.000	5.000.000			
199	689643	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	92.368.000	10.740.000	36.567.000	1.207.719.000	5.000.000			
200	689650	BNN KABUPATEN LUMAJANG	79.672.000	10.740.000	36.663.000	1.128.935.000	5.000.000			
201	689664	BNN KABUPATEN BLITAR	70.128.000	10.740.000	37.656.000	1.173.012.000	5.000.000			
202	689671	BNN KABUPATEN KEDIRI	72.548.000	10.740.000	36.507.000	1.132.095.000	5.000.000			
203	689685	BNN KABUPATEN SANGGAU	86.128.000	10.260.000	35.238.000	1.116.168.000	5.000.000			
204	689692	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	104.036.000	10.260.000	34.800.000	1.140.717.000	5.000.000			
205	689707	BNN KABUPATEN BALANGAN	66.410.000	10.260.000	33.999.000	1.126.199.000	5.000.000			
206	689711	BNN KOTA PALU	71.600.000	10.340.000	29.582.000	1.044.633.000	5.000.000			
207	689728	BNN KABUPATEN DONGGALA	65.582.000	10.340.000	36.698.000	1.094.087.000	5.000.000			
208	689732	BNN KABUPATEN POSO	73.860.000	10.340.000	37.598.000	1.133.754.000	5.000.000			
209	689749	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	137.182.000	10.340.000	38.018.000	1.193.696.000	5.000.000			
210	689753	BNN KOTA KENDARI	68.720.000	10.580.000	27.832.000	1.079.024.000	5.000.000			
211	689760	BNN KOTA BITUNG	62.216.000	10.980.000	33.840.000	1.189.230.000	5.000.000			
212	689774	BNN KOTA MANADO	62.000.000	10.980.000	27.658.000	1.222.556.000	5.000.000			
213	689781	BNN KOTA GORONTALO	81.320.000	10.100.000	25.060.000	1.107.888.000	7.500.000			
214	689795	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	86.150.000	10.100.000	32.620.000	1.175.130.000	5.000.000			
215	689800	BNN KOTA DENPASAR	80.640.000	10.580.000	30.718.000	1.209.130.000	5.000.000			
216	689817	BNN KABUPATEN BADUNG	56.308.000	7.780.000	39.934.000	1.338.977.000	5.000.000			
217	689821	BNN KABUPATEN GIANYAR	71.096.000	9.860.000	46.339.000	1.296.863.000	6.740.000			
218	689838	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	64.774.000	10.340.000	39.888.000	1.102.258.000	5.000.000			
219	689842	BNN KOTA KUPANG	81.560.000	10.660.000	36.050.000	1.106.981.000	5.000.000			
220	689859	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	131.848.000	10.660.000	38.240.000	1.077.237.000	5.000.000			
221	689863	BNN KOTA TUAL	67.320.000	10.820.000	36.451.000	1.150.055.000	5.000.000			
222	689870	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	74.050.000	10.900.000	36.852.000	1.364.744.000	5.000.000			
223	689884	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	83.978.000	10.900.000	40.962.000	1.156.426.000	5.000.000			
TOTAL			709.939.855.000	12.693.432.000	19.462.240.000	1.272.481.316.000	8.195.111.000	7.117.680.000	40.069.342.000	13.660.648.000



PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERNTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

NOMOR	KODE SATKER	SATKER	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3259	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
1	15405	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75.000.000	75.000.000					38.450.000	113.705.000	731.200.000	14.127.000	113.060.000						57.000.000	
2	15515	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	75.000.000	75.000.000					23.330.000	113.705.000	163.750.000	14.127.000	115.920.000						57.000.000	
3	20558	BNN KABUPATEN BOGOR	75.000.000	75.000.000					22.980.000	113.705.000	33.300.000	13.947.000	117.120.000						57.000.000	
4	20761	BNN KABUPATEN CIANJUR	75.000.000						19.175.000	113.705.000	70.650.000	13.947.000	148.140.000				75.000.000		57.000.000	
5	25137	BNN KOTA BANDUNG	75.000.000	75.000.000					19.175.000			13.947.000	171.940.000						57.000.000	
6	25447	BNN KOTA CIREBON	75.000.000	75.000.000					15.410.000	113.705.000	67.750.000	13.947.000	120.120.000						57.000.000	
7	26118	BNN KOTA CIMAHI	75.000.000						15.410.000	113.705.000	70.450.000	13.947.000	127.880.000						57.000.000	
8	31963	BNN KABUPATEN MAGELANG	75.000.000						18.105.000	113.705.000	33.740.000	14.360.000	86.080.000						57.000.000	
9	32057	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	75.000.000						14.830.000	113.705.000	39.880.000	13.550.000	70.030.000						57.000.000	
10	35665	BNN KOTA SURAKARTA	75.000.000	75.000.000					18.150.000		52.600.000	14.360.000	83.210.000						57.000.000	
11	40173	BNN KABUPATEN BANTUL	75.000.000						21.790.000	113.705.000	22.350.000	13.947.000	84.980.000						57.000.000	
12	40256	BNN KABUPATEN SLEMAN	75.000.000						18.175.000	113.705.000	26.580.000	13.947.000	95.430.000						57.000.000	
13	45165	BNN KOTA YOGYAKARTA	75.000.000	75.000.000					15.123.000			13.947.000	54.860.000						57.000.000	
14	52858	BNN KABUPATEN TUBAN	75.000.000						17.704.000	184.201.000	30.350.000	13.977.000	126.910.000						57.000.000	
15	60534	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	75.000.000	75.000.000					25.965.000	175.339.000	17.550.000	13.947.000	67.030.000						57.000.000	
16	61331	BNN KABUPATEN GAYO LUES	75.000.000	155.000.000					14.450.000	175.339.000	13.010.000	13.947.000	95.720.000						57.000.000	
17	61818	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	75.000.000						18.625.000	175.339.000	18.500.000	13.947.000							57.000.000	
18	65137	BNN KOTA BANDA ACEH	75.000.000						22.345.000	175.339.000	20.300.000	13.947.000	79.000.000						57.000.000	
19	70258	BNN KABUPATEN KARO	75.000.000						25.430.000	180.134.000	70.110.000	13.737.000	95.590.000						57.000.000	
20	70545	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	75.000.000						21.790.000	180.134.000	77.650.000	13.737.000	94.440.000						57.000.000	
21	70639	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	75.000.000	75.000.000					21.790.000	180.134.000	78.300.000	27.474.000	93.700.000						57.000.000	
22	72117	BNN KABUPATEN BATU BARA	75.000.000						10.904.000	180.134.000	81.400.000	13.737.000	87.340.000						57.000.000	
23	75345	BNN KOTA BINJAI	75.000.000						20.300.000	180.134.000	53.800.000	10.620.000	86.670.000						57.000.000	
24	75540	BNN KOTA TANJUNG BALAI	75.000.000	75.000.000					25.405.000	180.134.000	35.550.000	20.372.000	108.920.000						57.000.000	
25	81240	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	75.000.000						14.160.000	113.705.000	49.460.000	13.707.000	104.440.000						57.000.000	
26	91236	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	75.000.000						19.650.000	164.554.000	36.550.000	10.510.000	106.340.000						57.000.000	
27	111079	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	75.000.000						21.980.000	164.497.000	29.790.000	14.247.000	57.880.000						57.000.000	
28	120955	BNN KABUPATEN WAY KANAN	75.000.000						22.220.000	162.653.000	53.800.000	13.737.000	66.090.000						57.000.000	
29	130761	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	75.000.000						21.740.000	182.185.000	14.510.000	13.857.000	118.040.000						57.000.000	
30	145161	BNN KOTA PALANGKARAYA	75.000.000	75.000.000					18.050.000		17.420.000	13.527.000	70.810.000						57.000.000	
31	150343	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	75.000.000						15.645.000	113.705.000	30.300.000	13.857.000	72.320.000						57.000.000	
32	150751	BNN KABUPATEN TABALONG	75.000.000						11.700.000	113.705.000	13.820.000	13.857.000	57.330.000						57.000.000	
33	150958	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	75.000.000						18.275.000	113.705.000	13.820.000	13.857.000	78.000.000						57.000.000	
34	165162	BALAI REHABILITASI BNN TANAH MERAH											6.270.000			3.281.162.000				
35	165249	BNN KOTA BALIKPAPAN	75.000.000						26.780.000	113.705.000	19.100.000	14.037.000	88.420.000						57.000.000	
36	165352	BNN KOTA TARAKAN	75.000.000	75.000.000					26.080.000	164.987.000	31.750.000	14.037.000	124.280.000						57.000.000	
37	165441	BNN KOTA BONTANG	75.000.000	75.000.000					22.890.000		28.950.000	14.037.000	84.780.000						57.000.000	
38	190633	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	75.000.000						17.180.000	113.705.000	88.850.000	14.277.000	273.970.000						57.000.000	
39	195175	BALAI REHABILITASI BNN BADOCA											2.410.000			3.318.572.000				
40	205232	BNN KOTA BAU-BAU	75.000.000						19.258.000	113.705.000	17.600.000	14.217.000	278.690.000						57.000.000	
41	220155	BNN KABUPATEN BULELENG	75.000.000						23.015.000	113.705.000	32.250.000	13.887.000	232.170.000						57.000.000	
42	220348	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	75.000.000	75.000.000					7.650.000			9.382.000	59.780.000						57.000.000	
43	220547	BNN KABUPATEN KARANGASEM	75.000.000						12.185.000	113.705.000		13.887.000	118.400.000						57.000.000	
44	295420	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	75.000.000						25.865.000	113.705.000	36.500.000	14.037.000	200.830.000						57.000.000	
45	310153	BNN KABUPATEN GORONTALO	75.000.000						15.005.000	113.705.000		13.617.000	87.380.000						57.000.000	
46	310721	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	75.000.000						15.080.000	113.705.000	15.420.000	13.617.000	107.050.000						57.000.000	
47	320229	BNN KABUPATEN KARIMUN	75.000.000						19.419.000	175.547.000	13.750.000	13.887.000	107.580.000						57.000.000	
48	325136	BNN KOTA BATAM	75.000.000						16.000.000	175.547.000	24.200.000	13.887.000	91.100.000						57.000.000	
49	352628	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN																		
50	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA																		
51	403708	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	150.000.000	75.000.000		500.000.000			44.567.000	213.065.000	141.000.000	28.074.000	145.800.000				1.125.000.000		190.000.000	
52	403709	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	75.000.000						21.980.000	164.497.000	20.450.000	14.247.000	107.990.000						57.000.000	
53	403710	BNN KOTA DUMAI	75.000.000						18.300.000	164.554.000	44.650.000	13.827.000	83.090.000						57.000.000	
54	403711	BNN KOTA TANGERANG	75.000.000	75.000.000					22.220.000		49.550.000	14.037.000	208.210.000						57.000.000	
55	403713	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75.000.000	75.000.000					22.030.000		26.600.000	13.707.000	69.120.000						57.000.000	
56	403714	BNN KABUPATEN SUMEDANG	75.000.000						19.150.000	113.705.000	28.100.000	13.947.000	103.430.000						57.000.000	
57	403715	BNN KABUPATEN PASURUAN	75.000.000						15.755.000	184.201.000	23.700.000	13.977.000	61.550.000						57.000.000	
58	403716	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	75.000.000	75.000.000					12.375.000		68.890.000	13.400.000	95.720.000						57.000.000	
59	403717	LOKA REHABILITASI BNN DELI SERDANG SUMATERA UTARA											6.190.000			1.888.117.000				
60	418305	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	75.000.000						11.360.000	175.339.000	14.900.000	13.947.000	87.930.000						57.000.000	
61	418307	BNN KABUPATEN PIDIE	75.000.000						22.295.000	175.339.000	25.700.000	13.947.000	93.870.000						57.000.000	
62	418308	BNN KOTA TEBING TINGGI	75.000.000						21.790.000	180.134.000	28.700.000	13.737.000	101.620.000						57.000.000	
63	418309	BNN KABUPATEN SOLOK	75.000.000	75.000.000					22.055.000		29.550.000	13.707.000	64.450.000						57.000.000	



NOMOR	KODE SATKER	SATKER	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
64	418310	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	75.000.000						22.005.000	164.497.000	20.150.000	14.247.000	103.040.000						57.000.000	
65	418311	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	75.000.000						21.980.000	164.497.000	28.950.000	14.247.000	90.510.000						57.000.000	
66	418313	BNN KOTA BENGKULU	75.000.000	75.000.000					18.075.000				13.312.000						57.000.000	
67	418315	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	75.000.000						25.940.000	162.653.000	19.950.000	13.737.000	74.840.000						57.000.000	
68	418316	BNN KOTA METRO	75.000.000						29.560.000	162.653.000	53.560.000	13.737.000	121.820.000						57.000.000	
69	418317	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	75.000.000						15.600.000	113.705.000	13.900.000	13.242.000	71.590.000						57.000.000	
70	418318	BNN KOTA TASIKMALAYA	75.000.000						15.435.000	113.705.000	31.900.000	13.947.000	89.350.000						57.000.000	
71	418319	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	75.000.000						18.175.000	182.185.000	14.570.000	13.857.000	81.450.000						57.000.000	
72	418320	BNN KABUPATEN NUNUKAN	75.000.000						15.110.000	164.987.000	39.550.000	14.037.000	153.990.000						57.000.000	
73	418322	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	75.000.000	75.000.000					21.910.000		31.300.000	13.857.000	96.800.000						57.000.000	
74	418323	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGHE	75.000.000						17.205.000	113.705.000		14.247.000	71.540.000						57.000.000	
75	418324	BNN KABUPATEN SUMBAWA	75.000.000						22.630.000	113.705.000	70.000.000	13.827.000	100.710.000						57.000.000	
76	418537	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, BATAM KEPULAUAN RIAU											2.595.000			2.107.774.000				
77	418543	LOKA REHABILITASI NARKOBA BNN, KALIANDA LAMPUNG SELATAN											3.110.000			1.942.104.000				
78	419175	BNN KOTA SABANG	75.000.000						18.600.000	175.339.000	15.780.000	13.947.000	58.370.000						57.000.000	
79	419176	BNN KOTA GUNUNGSILOI	75.000.000						25.390.000	180.134.000	29.750.000	13.737.000	204.790.000						57.000.000	
80	419177	BNN KOTA SAWAHLUNTO	75.000.000						16.570.000	113.705.000	33.725.000	13.707.000	72.390.000						57.000.000	
81	419202	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	75.000.000						19.485.000	164.497.000	29.950.000	14.247.000	87.180.000						57.000.000	
82	419203	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	75.000.000						22.005.000	113.705.000		13.857.000	74.560.000						57.000.000	
83	419222	BNN KABUPATEN PELALAWAN	75.000.000						17.360.000	164.554.000	57.205.000	13.827.000	114.130.000						57.000.000	
84	419223	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	75.000.000						25.190.000	113.705.000	24.700.000	13.737.000	83.110.000						57.000.000	
85	419224	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	75.000.000						15.730.000	162.653.000	46.400.000	13.737.000	83.090.000						57.000.000	
86	419225	BNN KABUPATEN BANGKA	75.000.000						21.980.000	113.705.000	19.122.000	13.707.000	86.400.000						57.000.000	
87	419226	BNN KOTA CILEGON	75.000.000						22.220.000	113.705.000	16.440.000	14.037.000	94.460.000						57.000.000	
88	419227	BNN KABUPATEN SUKABUMI	75.000.000						19.175.000	113.705.000	30.750.000	13.947.000	91.510.000						57.000.000	
89	419228	BNN KOTA TEGAL	75.000.000						21.790.000	113.705.000	27.100.000	14.360.000	69.440.000						57.000.000	
90	419246	BNN KABUPATEN BANYUMAS	75.000.000						21.740.000	113.705.000	29.140.000	14.360.000	105.220.000						57.000.000	
91	419247	BNN KABUPATEN SUMENEP	75.000.000						22.435.000	184.201.000	28.100.000	13.977.000	96.210.000						57.000.000	
92	419248	BNN KOTA MOJOKERTO	75.000.000						22.460.000	184.201.000	99.400.000	13.977.000	169.740.000						57.000.000	
93	419249	BNN KABUPATEN SINTANG	75.000.000						21.740.000	182.185.000	12.890.000	13.857.000	92.080.000						57.000.000	
94	419256	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	75.000.000						21.570.000	113.705.000	18.020.000	13.527.000	95.600.000						57.000.000	
95	419257	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	75.000.000						21.860.000	113.705.000	17.140.000	13.857.000	74.990.000						57.000.000	
96	419258	BNN KOTA JAKARTA UTARA	75.000.000	75.000.000					38.450.000	113.705.000	144.850.000	14.127.000	94.380.000						57.000.000	
97	419259	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	75.000.000	75.000.000					15.645.000		38.850.000	14.247.000	63.610.000						57.000.000	
98	419260	BNN KABUPATEN BONE	75.000.000						27.240.000	113.705.000	158.150.000	14.277.000	108.250.000						57.000.000	
99	419261	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	75.000.000						22.580.000	113.705.000	18.750.000	19.780.000	78.400.000						57.000.000	
100	419262	BNN KABUPATEN MUNA	75.000.000						22.990.000	113.705.000	36.400.000	14.217.000	115.350.000						57.000.000	
101	419263	BNN KABUPATEN BOALEMO	75.000.000						11.460.000	113.705.000	57.500.000	13.617.000	111.180.000						57.000.000	
102	419264	BNN KABUPATEN BIMA	75.000.000						11.560.000	113.705.000		13.827.000	74.770.000						57.000.000	
103	419265	BNN KABUPATEN BELU	75.000.000	80.000.000					11.720.000			14.037.000	56.640.000						57.000.000	
104	419279	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	75.000.000	75.000.000					13.040.000		17.625.000	14.307.000	94.300.000						57.000.000	
105	419280	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	75.000.000						15.855.000	113.705.000	15.900.000	14.157.000	83.820.000						57.000.000	
106	419286	BNN KABUPATEN MIMIKA	75.000.000						16.540.000	113.705.000	22.140.000	14.657.000	99.280.000						60.000.000	
107	648961	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI																		
108	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN											56.875.000			8.681.648.000				
109	681595	SEKRETARIAT UTAMA																		
110	681600	INSPEKTORAT UTAMA																		
111	681617	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	8.544.327.000																5.078.674.000	
112	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		6.512.090.000						6.314.764.000										
113	681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN				63.146.171.000	13.400.097.000				6.454.653.000			20.555.052.000	5.261.423.000		15.869.426.000	8.966.594.000		
114	681642	DEPUTI BIDANG REHABILITASI							2.789.075.000			6.622.357.000	6.139.358.000							
115	681659	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA			5.635.980.000			4.785.976.000												
116	682448	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	75.000.000	75.000.000		250.000.000			61.280.000	115.825.000	383.580.000	14.127.000	166.650.000				800.000.000		170.000.000	
117	682452	BNN PROVINSI BANTEN	75.000.000	75.000.000		250.000.000			51.430.000	115.825.000	286.035.000	14.037.000	103.510.000				900.000.000		170.000.000	
118	682469	BNN PROVINSI JAWA BARAT	75.000.000	75.000.000		250.000.000			68.170.000	115.825.000	340.025.000	13.947.000	262.760.000				1.250.000.000		120.000.000	
119	682473	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	75.000.000	75.000.000		250.000.000			53.858.000	115.825.000	351.857.000	14.360.000	129.030.000				900.000.000		170.000.000	
120	682480	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	75.000.000	150.000.000		250.000.000			44.440.000	215.065.000	679.981.000	13.977.000	181.545.000				900.000.000		120.000.000	
121	682494	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	75.000.000	75.000.000		250.000.000			50.510.000	115.825.000	194.414.000	13.947.000	147.290.000				675.000.000		120.000.000	
122	682502	BNN PROVINSI LAMPUNG	75.000.000	75.000.000		250.000.000			43.000.000	213.064.000	270.592.000	13.737.000	211.165.000				750.000.000		170.000.000	
123	682516	BNN PROVINSI BALI	75.000.000	75.000.000		250.000.000			36.750.000	115.825.000	337.665.000	13.887.000	529.280.000				2.025.000.000		120.000.000	
124	682520	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	75.000.000	75.000.000		250.000.000			44.760.000	115.825.000	250.555.000	13.827.000	231.170.000				675.000.000		85.000.000	
125	682537	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	75.000.000	80.000.000		250.000.000			38.050.000	115.825.000	161.398.000	14.037.000	95.230.000				321.960.000		85.000.000	
126	682541	BNN PROVINSI ACEH	150.000.000	235.000.000		500.000.000			73.350.000	226.065.000	309.997.000	27.894.000	141.229.000				1.950.000.000		190.000.000	
127	682558	BNN PROVINSI BENGKULU	75.000.000	75.000.000		250.000.000			50.030.000	115.825.000	133.144.000	13.737.000	1.102.020.000				675.000.000		85.000.000	
128	682562	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	150.000.000	75.000.000		500.000.000			58.080.000	216.065.000	338.741.000	28.494.000	457.280.000				1.750.000.000		190.000.000	
129	682579	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	150.000.000	75.000.000		600.000.000			86.060.000	226.065.000	488.974.000	27.474.000	326.730.000							

NOMOR	KODE SATKER	SATKER	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
136	682647	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	75.000.000	75.000.000		250.000.000			37.200.000	115.825.000	196.555.000	13.857.000	162.290.000				675.000.000		120.000.000	
137	682651	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75.000.000	75.000.000		250.000.000			40.750.000	115.825.000	201.857.000	14.037.000	273.505.000				900.000.000		120.000.000	
138	682668	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	75.000.000	75.000.000		250.000.000			49.750.000	115.825.000	144.833.000	13.527.000	239.935.000				675.000.000		85.000.000	
139	682672	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	75.000.000	75.000.000		250.000.000			62.240.000	115.825.000	206.747.000	14.247.000	149.180.000				540.000.000		85.000.000	
140	682689	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	75.000.000	75.000.000		250.000.000			51.990.000	115.825.000	192.032.000	13.797.000	214.330.000				900.000.000		85.000.000	
141	682693	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	75.000.000	75.000.000		250.000.000			67.090.000	115.825.000	666.940.000	14.277.000	170.620.000				900.000.000		170.000.000	
142	682701	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	75.000.000	75.000.000		250.000.000			53.110.000	115.825.000	160.870.000	14.217.000	338.980.000				900.000.000		85.000.000	
143	682715	BNN PROVINSI GORONTALO	75.000.000	75.000.000		250.000.000			51.507.000	115.825.000	182.674.000	13.617.000	175.660.000				675.000.000		85.000.000	
144	682722	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	75.000.000	75.000.000		250.000.000			40.030.000	115.825.000	251.730.000	14.067.000	171.060.000				675.000.000		135.000.000	
145	682736	BNN PROVINSI MALUKU	75.000.000	80.000.000		250.000.000			35.600.000	115.825.000	265.616.000	14.307.000	525.080.000				975.000.000		170.000.000	
146	682740	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	75.000.000	80.000.000		250.000.000			40.050.000	115.825.000	198.216.000	14.157.000	196.650.000				650.000.000		135.000.000	
147	682757	BNN PROVINSI PAPUA	75.000.000	80.000.000		250.000.000			40.450.000	115.825.000	112.940.000	14.857.000	131.680.000				600.000.000		140.000.000	
148	682761	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	75.000.000	80.000.000		250.000.000			36.480.000	115.825.000	80.432.000	14.509.000	173.545.000				600.000.000		140.000.000	
149	682778	BNN KABUPATEN GARUT	75.000.000						22.955.000	113.705.000	50.550.000	13.947.000	138.620.000						57.000.000	
150	682782	BNN KABUPATEN KUNINGAN	75.000.000						19.200.000	113.705.000	65.900.000	13.947.000	81.360.000						57.000.000	
151	682799	BNN KABUPATEN CIAMIS	75.000.000						19.175.000	113.705.000	31.150.000	13.947.000	93.890.000						57.000.000	
152	682804	BNN KABUPATEN CILACAP	75.000.000	75.000.000					21.740.000	113.705.000	53.350.000	14.360.000	75.800.000						57.000.000	
153	682811	BNN KABUPATEN KENDAL	75.000.000						11.839.000	113.705.000	28.741.000	14.360.000	77.210.000						57.000.000	
154	682825	BNN KOTA MALANG	75.000.000						22.460.000	184.201.000	29.075.000	13.977.000	95.075.000						57.000.000	
155	682832	BNN KOTA BATU	75.000.000						16.770.000	184.201.000	30.875.000	13.977.000	102.860.000						57.000.000	
156	682846	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	75.000.000						18.775.000	184.201.000	51.350.000	13.977.000	105.220.000						57.000.000	
157	682850	BNN KABUPATEN NGANJUK	75.000.000						18.775.000	184.201.000	62.450.000	10.650.000	81.910.000						57.000.000	
158	682867	BNN KOTA MATARAM	75.000.000						26.335.000	113.705.000	46.650.000	13.827.000	122.740.000						57.000.000	
159	682871	BNN KOTA LHKOSEUMAWE	75.000.000	230.000.000					18.675.000	175.339.000	15.600.000	13.947.000					75.000.000		57.000.000	
160	682888	BNN KOTA LANGSA	75.000.000	75.000.000					22.245.000	175.339.000	16.700.000	13.947.000	116.780.000						57.000.000	
161	682892	BNN KOTA PAGARALAM	75.000.000						25.635.000	164.497.000	58.400.000	14.247.000	80.200.000						57.000.000	
162	682900	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	75.000.000						18.375.000	164.497.000	57.400.000	14.247.000	125.990.000						57.000.000	
163	682914	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	75.000.000						21.980.000	164.497.000	57.400.000	14.247.000	91.470.000						57.000.000	
164	682921	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	75.000.000	75.000.000					36.150.000	180.134.000	99.600.000	27.474.000	94.110.000						57.000.000	
165	682935	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	75.000.000						21.790.000	180.134.000	146.850.000	13.737.000	295.200.000						57.000.000	
166	682942	BNN KABUPATEN LANGKAT	75.000.000						25.355.000	180.134.000	71.650.000	13.737.000	168.320.000						57.000.000	
167	682956	BNN KOTA PAYAKUMBUH	75.000.000						18.768.000	113.705.000	150.000.000	13.707.000	76.310.000						57.000.000	
168	682960	BNN KOTA PANGKAL PINANG	75.000.000						18.375.000	113.705.000	19.425.000	13.707.000	74.790.000						57.000.000	
169	682977	BNN KOTA TANJUNG PINANG	75.000.000						22.700.000	175.547.000	21.020.000	13.887.000	121.250.000						57.000.000	
170	682981	BNN KOTA PONTIANAK	75.000.000						18.175.000	182.185.000	17.950.000	13.857.000	108.190.000						57.000.000	
171	682998	BNN KOTA SINGKAWANG	75.000.000						25.305.000	182.185.000	17.750.000	13.857.000	87.890.000						57.000.000	
172	683000	BNN KOTA BANJARMASIN	75.000.000						21.860.000	113.705.000	13.820.000	13.857.000	122.450.000						57.000.000	
173	689011	BNN KOTA BANJARBARU	75.000.000						14.790.000	113.705.000	20.550.000	13.857.000	213.660.000						57.000.000	
174	689025	BNN KOTA SAMARINDA	75.000.000						23.015.000	113.705.000	30.350.000	14.037.000	94.810.000						57.000.000	
175	689032	BNN KABUPATEN MOROWALI	75.000.000						18.875.000	113.705.000		13.797.000	214.380.000						57.000.000	
176	689046	BNN KOTA PALOPO	75.000.000	75.000.000					27.340.000		229.800.000	14.277.000	162.360.000						57.000.000	
177	689050	BNN KABUPATEN KOLAKA	75.000.000	80.000.000					19.250.000		20.050.000	14.217.000	232.190.000						57.000.000	
178	689067	BNN KABUPATEN JAYAPURA	75.000.000	80.000.000					8.620.000	113.705.000	16.120.000	14.657.000	117.120.000						60.000.000	
179	689444	BNN KABUPATEN BIREUEN	75.000.000	155.000.000					16.990.000	175.339.000	25.700.000	13.947.000	88.020.000						57.000.000	
180	689451	BNN KABUPATEN ASAHAN	75.000.000	75.000.000					28.970.000	180.134.000	123.400.000	27.474.000	127.970.000						57.000.000	
181	689465	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	75.000.000	75.000.000					18.862.000	180.134.000	49.450.000	13.737.000	74.140.000				75.000.000		57.000.000	
182	689472	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	75.000.000						21.790.000	180.134.000	51.300.000	13.737.000	177.190.000						57.000.000	
183	689486	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	75.000.000						21.790.000	180.134.000	123.250.000	13.737.000	109.920.000						57.000.000	
184	689490	BNN KOTA PRABUMULIH	75.000.000						14.820.000	164.497.000	53.800.000	14.247.000	159.470.000						57.000.000	
185	689508	BNN KOTA JAMBI	75.000.000						21.980.000	113.705.000		13.857.000	82.720.000						57.000.000	
186	689512	BNN KABUPATEN BATANGHARI	75.000.000	75.000.000					22.030.000		11.900.000	13.857.000	86.710.000						57.000.000	
187	689529	BNN KOTA PEKANBARU	75.000.000						13.700.000	164.554.000	45.350.000	13.827.000	86.420.000						57.000.000	
188	689533	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	75.000.000	75.000.000					15.080.000	162.653.000	171.700.000	13.737.000	105.150.000						57.000.000	
189	689540	BNN KABUPATEN BELITUNG	75.000.000						11.145.000	113.705.000	19.950.000	13.707.000	84.330.000						57.000.000	
190	689554	BNN KABUPATEN SIDOARJO	75.000.000						23.292.000	184.201.000	72.975.000	13.977.000	188.090.000						57.000.000	
191	689561	BNN KOTA DEPOK	75.000.000	75.000.000					26.705.000		19.750.000	13.947.000	165.370.000						57.000.000	
192	689575	BNN KABUPATEN KARAWANG	75.000.000	75.000.000					30.470.000		85.750.000	13.947.000	74.670.000						57.000.000	
193	689582	BNN KABUPATEN BATANG	77.000.000						18.175.000	111.705.000	27.050.000	14.360.000	93.870.000						57.000.000	
194	689596	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	75.000.000						15.360.000	113.705.000	31.350.000	14.360.000	81.340.000						57.000.000	
195	689601	BNN KOTA SURABAYA	75.000.000						18.670.000	184.201.000	191.800.000	13.977.000	199.630.000						57.000.000	
196	689618	BNN KOTA KEDIRI	75.000.000						15.190.000	184.201.000	52.900.000	13.460.000	68.830.000						57.000.000	
197	689622	BNN KABUPATEN MALANG	75.000.000						15.190.000	184.201.000	37.500.000	13.977.000	157.720.000						57.000.000	
198	689639	BNN KABUPATEN GRESIK	75.000.000																	

NOMOR	KODE SATKER	SATKER	3247	3248	3250	3251	3252	3253	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	4020	5354	5355	5936	6239
208	689732	BNN KABUPATEN POSO	75.000.000						18.875.000	113.705.000	14.100.000	13.797.000	119.500.000						57.000.000	
209	689749	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	75.000.000						18.875.000	113.705.000		13.797.000	233.350.000						57.000.000	
210	689753	BNN KOTA KENDARI	75.000.000						12.390.000	113.705.000	69.550.000	14.217.000	280.460.000						57.000.000	
211	689760	BNN KOTA BITUNG	75.000.000						17.200.000	113.705.000	13.800.000	14.247.000	65.880.000						57.000.000	
212	689774	BNN KOTA MANADO	75.000.000						23.540.000	113.705.000	36.850.000	14.247.000	72.410.000						57.000.000	
213	689781	BNN KOTA GORONTALO	75.000.000	75.000.000					14.980.000			13.617.000	91.490.000						57.000.000	
214	689795	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	75.000.000						22.320.000	113.705.000		13.617.000	90.900.000						57.000.000	
215	689800	BNN KOTA DENPASAR	75.000.000						16.910.000	113.705.000		13.887.000	116.530.000						57.000.000	
216	689817	BNN KABUPATEN BADUNG	75.000.000						14.500.000	113.705.000	80.125.000	13.887.000	278.730.000						57.000.000	
217	689821	BNN KABUPATEN GIANYAR	75.000.000						11.620.000	113.705.000	43.550.000	13.887.000	142.850.000						57.000.000	
218	689838	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	75.000.000	75.000.000					15.370.000		26.300.000	13.827.000	105.180.000						57.000.000	
219	689842	BNN KOTA KUPANG	75.000.000						7.980.000	113.705.000		14.037.000	73.710.000						57.000.000	
220	689859	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	75.000.000						18.925.000	113.705.000		14.037.000	61.180.000						57.000.000	
221	689863	BNN KOTA TUAL	75.000.000						15.700.000	113.705.000	22.225.000	14.307.000	267.440.000						57.000.000	
222	689870	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75.000.000	80.000.000					19.675.000			14.157.000	87.950.000						57.000.000	
223	689884	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75.000.000						19.600.000	113.705.000		14.157.000	169.950.000						57.000.000	
Grand Total			24.596.327.000	13.055.990.000	5.635.980.000	73.646.171.000	13.400.097.000	4.785.976.000	7.886.355.000	32.589.939.000	23.088.056.000	9.646.436.000	33.457.286.000	20.555.052.000	5.261.423.000	21.219.377.000	49.856.386.000	8.966.594.000	19.550.674.000	4.263.644.000

